

Buletin La'ó Hamutuk

Vol. 4, No. 3-4

Agustus 2003

Lihat Laporan Brazil's tentang Bantuang ke Timor Leste, hal 14.

Tinjauan ulang mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor

Banyak hal telah terjadi sejak akhir tahun 2002, ketika *La'ó Hamutuk* membuat laporan terakhir mengenai minyak dan gas di Laut Timor. Sebagaimana telah diuraikan dalam artikel-artikel terdahulu (lihat *Buletin La'ó Hamutuk Vol. 3 No. 4-8*), kekayaan dasar laut ini memberi banyak harapan dan juga menimbulkan bahaya-bahaya yang serius bagi masa depan ekonomi Timor Lorosa'e, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Artikel-artikel dalam buletin ini mengulas peristiwa-peristiwa terpenting yang terjadi selama ini.

Pada halaman 13, Anda akan membaca daftar istilah yang menerangkan tentang istilah-istilah teknis yang digunakan dalam artikel ini. Sejumlah kata dan ungkapan yang digarisbawahi dalam teks ini didefinisikan pada daftar istilah tersebut.

Buletin *La'ó Hamutuk* telah menguraikan tentang sejarah dan kandungan minyak lepas pantai yang besar di antara Timor Lorosa'e dan Australia, menyadari akan hal itu maka kami mulai menurunkan artikel-artikel ini dengan mengkaji ulang informasi sekitar persoalan laut Timor.

Halaman 5 menguraikan tentang bagaimana Australia menakuti Timor Lorosa'e agar menandatangani Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) mengenai ladang gas alam terbesar Greater Sunrise di Wilayah Pengembangan Minyak Bersama atau Timor Gap. Sesudah Timor Lorosa'e menandatangani kesepakatan Penyatuan Internasional, Australia langsung meratifikasi Kesepakatan Laut Timor yang kini sedang diberlakukan dalam eksplorasi bersama.

Pembangunan proyek minyak dan gas Bayu-Undan dalam skala besar telah dimulai, dan ladang tersebut akan mulai menghasilkan cairan (Cairan minyak gas serta kondensat) kurang lebih setahun. Proyek tersebut juga telah memberikan pajak bagi Timor Lorosa'e dan sejumlah lapangan kerja bagi orang Timor Lorosa'e, walaupun nampaknya tidak ada investasi yang bisa dilakukan di negeri ini. Setelah melakukan penafsiran terhadap pendapatan atau uang, Timor Lorosa'e bisa memprediksikan uang yang akan didapat dari ladang ini, untuk itu kami mengkaji ladang minyak dan gas yang lebih kecil yang ditemukan di wilayah laut Timor.

Artikel pada halaman 9 menguraikan tentang Kesepakatan Penyatuan Internasional Greater Sunrise yang ditandatangani pada bulan Maret serta alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk pengembangan ladang tersebut. Timor Lorosa'e memandang bahwa Kesepakatan Laut Timor dan Kesepakatan Sunrise sebagai kesepakatan-kesepakatan sementara yang mana kesepakatan itu akan diganti jika Timor Lorosa'e dan Australia menyepakati batas laut antara Zona Ekonomi Eksklusif yang tumpang-tindih itu. Tetapi sebagaimana digambarkan pada halaman 11, Australia telah menghambat proses negosiasi batas tersebut dan menarik diri dari proses hukum internasional yang dapat menyelesaikan sengketa ini. Akhirnya, kami mengulas sejumlah peristiwa terbaru yang berkaitan dengan minyak Timor Lorosa'e dan sejumlah rujukan internasional dan pendidikan baru yang telah dihasilkan.



Kompresi, kegunaan dan panggung/platform tempat tinggal untuk Bayu-undan telah dibuat di Korea Selatan dan sudah dibawa ke laut Timor pada bulan Juni 2003

(foto diambil dari ConocoPhillips dan TSDA)

Daftar isi:

Latar Belakang sejarah Laut Timor	2
Batas-Batas dan ladang-ladang minyak	3
Australia menakuti atau memeras Timor Lorosa'e .	5
Kesepakatan penyatuan internasional Sunrise ditanda-tangani	9
Australia menghambat batas negara	10
Daftar istilah minyak dan gas	13
Berita Singkat	15
Kerjasama Brazil di Timor Lorosa'e	16
Konferensi mitra pembangunan	21
Editorial: Apa yang di lakukan oleh UNMISSET sekarang?	23
Editorial: Operasi darurat militer di Aceh	28

La'ó Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e

P.O. Box 340, Dili, East Timor (via Darwin, Australia)

Mobile: +(670)7234330; Telepon: +670(390)325-013

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Situs/Web: <http://www.etan.org/lh>

Latar Belakang Sejarah Laut Timor

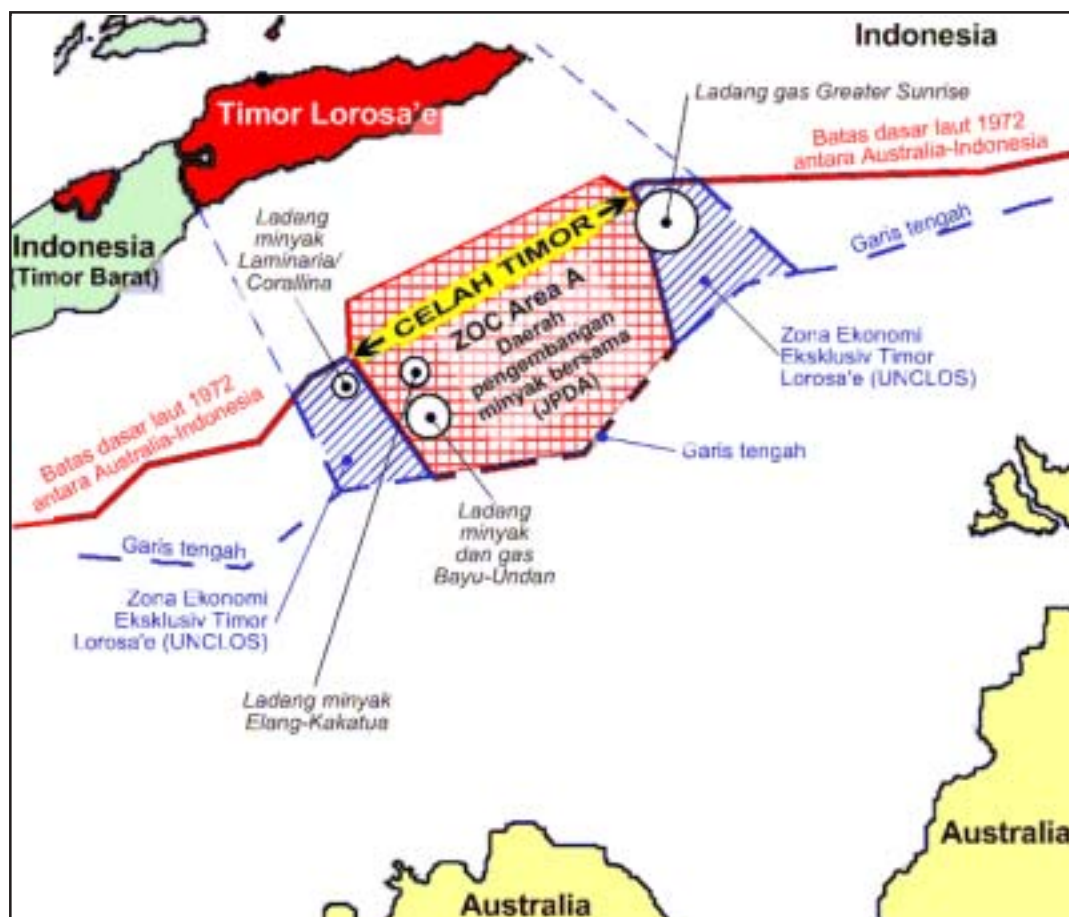
Kemerdekaan ekonomi Timor Lorosa'e tergantung pada uang yang akan didapat oleh negara baru ini dengan cara menjual kekayaan alamnya, terutama kandungan minyak yang terdapat di dasar Laut Timor antara Timor Lorosa'e dan Australia. Ladang-ladang minyak dan gas yang bernilai lebih dari 30 miliar dolar AS ini letaknya lebih dekat dengan pantai selatan Timor Lorosa'e dari pada pulau lainnya. Tetapi, karena sejarah penjajahan, pendudukan, dan kegiatan-kegiatan ilegal oleh Indonesia dan Australia, Timor Lorosa'e hanya bisa menerima sedikit dari setengah kekayaan tersebut yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) adalah haknya Timor Lorosa'e.

Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani Kesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, dan membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia. Karena Portugal (sebagai penguasa kolonial Timor Lorosa'e pada saat itu) menolak untuk ikut dalam perundingan tersebut maka pembuatan batas tidak rampung, dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan "Celah Timor atau Timor Gap" (lihat peta halaman 3).

Tiga tahun setelah penentuan batas antara kedua negara, Indonesia melakukan invasi ke Timor Lorosa'e. Kemudian pada tahun 1979, Australia dan Indonesia memulai negosiasi yang membimbing mereka pada Kesepakatan Celah Timor tahun 1989 dan membagi kekayaan dasar laut di dalam "Celah" tersebut, dengan memberikan sebagian besar kekayaan itu kepada Australia sebagai balas budi atas pengakuan Australia terhadap aneksasi ilegal Indonesia di Timor Lorosa'e. Dari pada merampungkan garis batas, Kesepakatan tersebut mendefinisikan Zona Kerjasama

(ZOC). Dalam Zona A di bagian tengah dari ZOC, kekayaan dibagi secara merata antara Australia dan Indonesia. Australia terus menguasai wilayah-wilayah timur dan barat dari ZOC berdasarkan pada kesepakatan 1972 dengan Indonesia, walaupun berdasarkan prinsip UNCLOS sebagian wilayah tersebut kini merupakan bagian dari Timor Lorosa'e. Setelah pembantaian Santa Cruz 1991, perusahaan-perusahaan minyak internasional segera memulai penandatanganan kontrak dengan Australia dan Indonesia untuk melakukan eksplorasi di dasar Laut Timor. Namun minyak yang ada di dalam wilayah Timor Lorosa'e baru ditemukan pada awal 1994 dan disarikan pada 1998 dari ladang minyak Elang-Kakatua di dalam ZOC-A. Tidak ada kandungan minyak yang cukup besar yang telah ditemukan di wilayah B dan C dari ZOC. Pada tahun 1994, ladang Laminaria-Corallina yang lebih besar hanya ditemukan pada bagian barat dari ZOC (lihat peta di bawah).

Karena pendudukan Indonesia atas Timor Lorosa'e adalah ilegal, maka Kesepakatan Celah Timor juga ilegal karena itu pula Portugal mengadu kesepakatan itu ke Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ). Namun pada tahun 1995 ICJ memutuskan bahwa badan ini tidak dapat membatalkan kesepakatan itu karena Indonesia tidak menerima yurisdiksi ICJ, akan tetapi Timor Lorosa'e masih memiliki hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dipungkiri. Akhirnya, pada tahun 1999 hak penentuan nasib sendiri diperolehnya, selanjutnya kesepakatan Celah Timor menguap ketika pendudukan berdarah Indonesia mencapai titik puncaknya yang paling akhir. Sebulan kemudian, Woodside Australian Energy memulai produksi minyak dari ladang Laminaria-Corallina yang paling menguntungkan.



Selama Pemerintahan Transisi PBB (UNTAET), pemimpin-pemimpin PBB dan Timor Lorosa'e menyadari pentingnya minyak di dasar laut bagi masa depan Timor Lorosa'e, karena itu mereka-pun berupaya untuk mempertahankan kontrak-kontrak perusahaan minyak dan melanjutkan pengeksplorasian di laut Timor, dengan demikian secepatnya Timor Lorosa'e dapat menerima pendapatan dari minyak dan gas dari laut Timor. Mereka juga berusaha untuk melindungi kepentingan Australia dengan mengizinkan tetangga Timor Lorosa'e di bagian selatan itu untuk terus menguasai wilayah laut yang diserahkan kepadanya oleh Indonesia.

Kesepakatan UNTAET-Australia pertama yang dibuat pada tahun 2000 melanjutkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Kesepakatan Celah Timor pada tahun 1989 antara Indonesia dan Australia tetapi hanya menggantikan "Timor Lorosa'e" dengan "Indonesia" dalam seluruh naskah itu. Pembagian pendapatan 50-50 dari daerah Kerjasama Area A (yang sekarang disebut Wilayah pengembangan minyak bersama) tetap dipertahankan, lalu dibentuk pula suatu badan bersama antara dua negara (Otoritas Bersama Wilayah pengembangan minyak bersama) yang berada di bawah kontrol bersama UNTAET dan Australia untuk tetap mengelola eksplorasi tersebut. Tahun berikutnya, UNTAET dan Australia merundingkan kembali kesepakatan tersebut guna membagi produksi minyak di dalam zona itu. Hasil dari perundingan itu adalah 90% dari pendapatan minyak dan gas akan diterima oleh Timor Lorosa'e dan 10%nya akan diterima oleh Australia. Kemudian pada bulan Juli 2001, Rancangan

laut Timor itu ditandatangani. Dengan demikian maka Australia secara terimplisit mengakui bahwa secara hukum JPDA terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Lorosa'e. Akan tetapi, Otoritas Bersama tetap sama yakni di bawah kontrol bersama Dili dan Canberra dengan basis di Darwin.

Dalam bulan-bulan menjelang kemerdekaan, rancangan ini diubah ke dalam Kesepakatan Laut Timor antara Timor Lorosa'e dan Australia yang kemudian ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002, pada hari pertama Timor Lorosa'e dinyatakan sebagai suatu negara merdeka. Kesepakatan Laut Timor melanjutkan pembagian 90-10, tetapi mendefinisikan kembali Otoritas Bersama sebagai Otoritas perwakilan Laut Timor (TSDA) dan Timor Lorosa'e diberikan dua dari tiga Kepala Komisi TSDA. Tidak ada satu pembicaraan pun yang dilakukan oleh UNTAET dan Australia mengenai wilayah-wilayah di luar ZOC/JPDA, yang telah Australia lakukan eksplorasi kekayaan dasar laut, yang mana secara hukum seharusnya merupakan milik Timor Lorosa'e. Walaupun Kesepakatan Laut Timor dan Kesepakatan lainnya menyatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan itu "tanpa merugikan" penyelesaian batas laut di masa depan (kesepakatan-kesepakatan itu dengan sendirinya tidak berlaku ketika batas-batas negara disepakati), tetapi nampaknya tidak ada keinginan dari Australia untuk menentukan batas laut yang nantinya akan mengakhiri pendudukan laut yang menguntungkan sampai semua minyak habis dieksplorasi atau disulingkan.

Batas Laut dan Ladang-ladang Minyak

Peta di samping menunjukkan letak Laut Timor antara Timor Lorosa'e dan Australia. Garis yang terputus-putus merupakan garis tengah/median line antara Timor Lorosa'e, Indonesia dan Australia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang berlaku sekarang seharusnya batas laut ditentukan atau ditarik dari garis tengah ini jika jarak antara dua negara lebih dekat dari 400 mil. Namun sekarang ini, daerah-daerah yang ditandai dengan garis-garis dikuasai oleh Australia, walaupun banyak pakar hukum maritim percaya wilayah-wilayah tersebut seharusnya termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Lorosa'e sesuai dengan prinsip UNCLOS.

Garis tebal merupakan batas dasar laut yang ditentukan oleh Australia dan Indonesia pada tahun 1972. Sebagian besar minyak di dalam Laut Timor terletak di bagian selatan garis ini dan juga di bagian utara dari garis tengah yang lebih dekat ke Timor Lorosa'e dari pada Australia. Wilayah yang ditandai dengan garis kotak-kotak adalah Wilayah Eksplorasi Minyak Bersama yang memberikan 90% pendapatan kepada Timor Lorosa'e dan 10% kepada Australia seperti yang termuat dalam Kesepakatan Laut Timor.

Ladang-ladang minyak yang ditunjukkan di dalam peta ini merupakan ladang-ladang yang paling penting bagi negara Timor Lorosa'e walaupun ada ladang yang lebih kecil. Ada juga ladang-ladang yang lebih besar lagi yang terletak di bagian selatan dan barat berdekatan dengan Australia dan Indonesia dari pada Timor Lorosa'e, tetapi ladang-ladang itu tidak diperlihatkan dalam peta ini. Semua ladang di dalam peta besar, kemungkinan seluruhnya termasuk bagian dari Timor Lorosa'e sesuai dengan prinsip-prinsip garis tengah:

Elang-Kakatua adalah ladang minyak berukuran kecil yang pertama kali ditemukan dan dieksplorasi di dalam Daerah Pengeksplorasi Minyak Bersama/JPDA. Ladang ini dieksplorasi oleh perusahaan perminyakan ConocoPhillips dan telah menghasilkan pendapatan sekitar 50 juta dolar AS yang telah dibagi antara Australia dan Indonesia ketika Timor Lorosa'e diduduki oleh Indonesia, kemudian setelah kemerdekaan Timor Lorosa'e memperoleh pendapatan dari Elang-Kakatua menggantikan Indonesia. Sekitar 90% kandungan minyaknya telah dieksplorasi atau disulingkan. Sekarang ini Timor Lorosa'e menerima 90% royalti dan pajak dari Elang-Kakatua.

Bayu-Undan adalah ladang gas yang besar di dalam JPDA. Ladang ini kaya akan cairan gas alam yakni minyak bergas yang dicairkan (LPG) dan kondensatnya. Sekarang, Ladang Gas Bayu-Undan sedang dieksplorasi oleh perusahaan minyak ConocoPhillips. Pembangunan konstruksi Bayu-Undan sudah hampir selesai, menyusul diberlakukannya Kesepakatan Laut Timor. Tahap pengembangan cairan gas Bayu-Undan diharapkan akan menghasilkan sekitar 1,8 miliar dolar AS untuk Timor Lorosa'e saat produksinya dimulai pada awal tahun 2004 selama 20 tahun ke depan. Tahap kedua yang akan dimulai pada bulan April 2006 adalah pemasangan pipa untuk mengangkut gas alam dari Bayu-Undan ke Darwin Australia untuk dicairkan lalu langsung diekspor ke Jepang. Dari penjualan ini Timor Lorosa'e akan memperoleh 1,2 miliar selama 17 tahun pengeksplorasi. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam kesepakatan sekarang, Timor Lorosa'e akan mendapatkan 90% royalti

dan pajak dari Bayu-Undan

Greater Sunrise mengandung gas dua kali lipat lebih banyak dari Bayu-Undan. Ladang gas ini hanya sekitar 20% yang terletak di dalam Wilayah pengembangan minyak bersama sedangkan wilayah seluas 80% berada di luar daerah kerja sama/JPDA yang sedang dikuasai Australia tetapi juga sedang diklaim oleh Timor Lorosa'e. Woodside Australian Energy yang melakukan eksplorasi ini berharap agar bisa memulai produksinya sekitar tahun 2009 yang mungkin menggunakan pabrik pencairan gas terapung yang pertama di dunia yang akan dikembangkan dan dioperasikan oleh Shell. Dengan diratifikasinya Kesepakatan Laut Timor, proses Pembangunan ladang Sunrise sedang menunggu Australia dan Timor Lorosa'e untuk meratifikasi

Kesepakatan Unitisasi Internasional (IUA, lihat di bawah), namun masih ada sejumlah keputusan yang harus dibuat lagi pula belum ada pembeli gas yang teridentifikasi.

Ladang minyak Laminaria-Corallina terletak di luar JPDA tetapi lokasinya lebih dekat dengan Timor Lorosa'e dimana perairannya juga diklaim oleh Timor Lorosa'e dan Australia. Ladang minyak ini dieksplorasi oleh Woodside. Ladang ini mulai memproduksi minyak pada akhir tahun 1999 dan akan minyaknya akan habis pada tahun 2005. Ladang ini telah menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS bagi Australia, dan Timor Lorosa'e tidak memperoleh satu sen pun dari ladang ini.

Tabel berikut ini menunjukkan kandungan energi yang ditaksir dalam ladang-ladang minyak yang besar yang ada di antara dua negara. Ladang-ladang ini tidak termasuk ladang yang letaknya lebih dekat dengan Indonesia dari pada Timor Lorosa'e (seperti Browse Basin dan area Ashmore-Cartier), atau ladang-ladang yang jelas berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif Timor Lorosa'e. Tabel berikut dinyatakan dalam juta per barel minyak (BOE).

Ladang-ladang Minyak dan Gas yang ada di dalam Laut Timor antara Timor Lorosa'e dan Australia						
Ladang	Lokasi	P e r k i r a a n cadangan (juta per barel)	Kesepakatan Laut Timor dan Penyatuan		Menurut prinsip-prinsip legal UNCLOS	
			Diterima oleh Australia	Diterima oleh Timor Lorosa'e	Diterima oleh Australia	Diterima oleh Timor Lorosa'e
Evans Shoal Petrel-Tern Blacktip	Bagian Australia dilihat dari garis tengah	1540	1540	0	1540	0
Elang - Kakatua Bayu-Undan Chudditch Kuda Tasi Jahal	JPDA (bagian Timor Lorosa'e dilihat dari garis tengah), tetapi tidak termasuk dalam IUA	1110 (termasuk 30 yang telah dieksplorasi)	111	999	0	1110
Greater Sunrise	IUA, bagian Timor Lorosa'e dari garis tengah, 20.1% di dalam JPDA	1920	1573	347	0	1920
Laminaria- Corallina Buffalo	Bagian Timor Lorosa'e dari garis tengah, terletak di luar IUA dan di bagian barat JPDA	270 (termasuk 220 yang telah disulingkan)	270	0	0	270(cadangan harus dibagi ulang)
Total		4840	3494	1346	1540	3300

Angka-angka di atas diperoleh dari berbagai sumber sekitar akhir 2002. Tabel tersebut menunjukkan 32% dari sumber-sumber minyak di dalam Laut Timor berada di daerah Australia berdasarkan garis tengah, sementara 68%nya berada di wilayah Timor Lorosa'e. Jika kita melihat pada hak perolehan Timor Lorosa'e atas pembagian sebesar 68%, kita dapat melihat bahwa:

- Berdasarkan Kesepakatan Laut Timor, Timor Lorosa'e memberikan kekayaan ini kepada Australia sebesar 10% dari JPDA (tidak termasuk Sunrise), atau dengan kata lain kita memberikan 3% dari seluruh perolehan dari kekayaan Laut Timor.
- Sesuai dengan Kesepakatan Penyatuan Internasional, Timor Lorosa'e memberikan kepada Australia 82% dari Greater Sunrise, yang mencapai 48% dari jumlah keseluruhan kekayaan Timor Lorosa'e.
- Dengan menolak bernegosiasi mengenai batas, Australia sedang mengambil keuntungan tambahan sebesar 8% dari minyak Timor Lorosa'e yang terletak di sebelah barat JPDA walaupun berdasarkan batas garis tengah atau median line, ladang-ladang itu berada di wilayah Timor Lorosa'e.
- Dari kedua kesepakatan di atas memberikan sekitar dua miliar barel minyak dari wilayah Timor Lorosa'e kepada Australia dan hal ini menyebabkan kerugian sekitar 59% dialami oleh Timor Lorosa'e dari cadangan minyak dan gas itu. Kendatipun tidak ditunjukkan di dalam tabel di atas, namun Australia memiliki lebih dari empat kali lebih besar dari seluruh cadangan minyak di Laut Timor yang ada di area-area lainnya.



Penampung terapung dan fasilitas pengangkutan "liberdade" sedang diluncurkan sejak bulan September 2002 dari Korea Selatan. Kapan ini akan berlabuh secara permanen di ladang Bayu-Udan, memuat kondensat dan cairan gas alam lainnya ke dalam tengker sebagai tahap awal dari proyek itu. (lihat Hal. 6)

(Foto diambil dari ConnocoPhillip dan TSDA).

Australia Menakuti atau Memeras Timor Lorosa'e

Pada bulan Mei tahun 2000 yang lalu, selang waktu beberapa hari sebelum Perdana Menteri Timor Lorosa'e dan Australia menandatangani Kesepakatan Laut Timor, *La'o Hamutuk* menuliskan artikel tentang Kesepakatan itu. Sebelas bulan kemudian, setelah parlemen dari kedua negara meratifikasi Kesepakatan itu maka dengan sendirinya kesepakatan itu dinyatakan mulai berlaku. Berbagai dalih di balik penundaan adalah bersifat instruktif, dan bisa memberikan indikasi suatu pola negosiasi dan hubungan di masa depan.

Kesepakatan Laut Timor merupakan esensi bagi pembangunan proyek Bayu-Udan, dan ladang tersebut akan mendatangkan pendapatan yang cukup berarti kepada Timor Lorosa'e sekitar selama tiga tahun. Perolehan pendapatan dari ladang Bayu-undan ini lebih cepat dari ladang minyak besar lain. Karena Australia memiliki banyak sumber pendapatan dari ladang-ladang yang lain juga karena negara tersebut hanya menerima pendapatan 10% dari Bayu-Udan maka Bayu-Udan dianggapnya tidak terlalu penting bagi mereka dibandingkan Timor Lorosa'e.

Tetapi ladang Greater Sunrise yang mengandung gas dalam jumlah yang lebih besar dianggapnya landang yang sangat penting bagi Australia karena kurang lebih seper-lima dari ladang ini berada di dalam wilayah JPDA, dan sebagian besarnya berada di luar daerah kerja sama. Ketika Timor Lorosa'e dan Australia menanda-tangani Kesepakatan Laut Timor, mereka sepakat untuk merundingkan suatu Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA, lihat halaman 9) bagi ladang Sunrise yang hanya memberikan 20,1% dari kandungan gas kepada daerah kerja bersama/JPDA dan sisanya yang dalam jumlah besar didapat oleh Australia.

Bagi Australia, pengeksplorasi gas di ladang Sunrise menjadi lebih bernilai sepuluh kali lipat dari Bayu-Udan, walaupun Australia akan memperoleh pendapatan dari pengolahan kedua ladang tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang berlaku sekarang, Timor Lorosa'e hanya menerima pendapatan sebesar seperempat dari Sunrise dibandingkan dengan pendapatan dari Bayu-Udan. Jadi, sementara Timor Lorosa'e memprioritaskan Kesepakatan Laut Timor, Australia memprioritaskan Kesepakatan penyatuan

internasional untuk Sunrise dengan Timor Lorosa'e.

Ketika mereka menandatangani Kesepakatan Laut Timor pada Mei 2002, kedua pemerintah sepakat untuk "bekerja lebih cepat dengan etiket yang baik untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang memuaskan masing-masing pihak agar Kesepakatan tersebut bisa diberlakukan". Timor Lorosa'e tetap berpegang teguh pada komitmennya dengan mempresentasikan Kesepakatan itu kepada parlemennya pada bulan November untuk diperdebatkan. Sebagai jawabannya maka pada tanggal 17 Desember, Kesepakatan tersebut diratifikasi oleh parlemen dengan suara 65 mendukung dan 13 suara menolak.

Saat Perdana Menteri Australia dan Timor Lorosa'e menanda-tangani Kesepakatan tersebut, kedua Perdana Menteri itu juga setuju untuk merundingkan Kesepakatan penyatuan internasional Sunrise pada akhir tahun 2002. Perundingan-perundingan itu berjalan sangat lambat dari yang diharapkan sebelumnya karena secara sepihak Timor Lorosa'e menolak mengakui kedaulatan Australia atas wilayah di luar JPDA, tetapi sebaliknya Timor Lorosa'e tetap menuntut sehingga Kesepakatan tersebut "tanpa merugikan" penyelesaian batas laut di masa depan sama seperti yang telah disepakati dalam Kesepakatan Laut Timor.

Pada bulan Oktober tahun 2002, Timor Lorosa'e mengesahkan Hukum kelautan tentang batas perairan negara dengan menentukan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif dari berbagai arah dengan berpatokan pada prinsip-prinsip hukum kelautan PBB. Karena pengklaiman tumpang-tindih atas wilayah laut antara Indonesia dengan Australia, maka Timor Lorosa'e akan berunding dengan kedua negara tetangganya tersebut guna menentukan luas wilayah negara baru ini. Kendatipun Dili telah berulang kali meminta kepada Australia untuk memulai perundingan mengenai batas perairan, Canberra masih belum menyambut undangan tersebut.

Pada bulan November 2002 dalam salah satu sesi negosiasi IUA di Dili, Menlu Australia Alexander Downer mengatakan kepada Perdana Menteri Timor Lorosa'e Mari Alkatiri: "Menganggap kami penggertak yang menakutkan adalah hal yang sangat aneh bagi Australia. Kami pernah memiliki

kesepakatan ekonomi yang baik dengan Indonesia; kami memberikan jaminan kepada Timor Lorosa'e tanpa memperoleh keuntungan ekonomi apa pun. Hubungan kami sangat penting, secara khusus bagi kamu, Timor Lorosa'e. Dua negara yang harus anda perhitungkan adalah Portugal dan Australia. ... Pada prinsipnya kami secara mengejutkan tidak fleksibel. ... Kami sangat keras. Kami tidak peduli jika Anda memberikan informasi kepada media. Biarkan saya memberikan pelajaran privat mengenai ilmu politik – ini bukan merupakan kesempatan.”

Proyek Sunrise telah dijalankan selama bertahun-tahun tetapi operator proyek Sunrise belum juga menemukan pembelinya. Selain itu, juga belum ada keputusan yang dibuat untuk pelaksanaan pembangunan dasar, karena itu Timor Lorosa'e tidak perlu tergesa-gesa untuk menandatangani kesepakatan penyatuan internasional. Namun demikian, di satu sisi Australia sangat berantusias untuk mengunci ladang Sunrise dengan satu kesepakatan. Untuk maksud tersebut Australia mulai memaksa Timor Lorosa'e untuk mengakui wilayah yang terletak di luar JPDA yang dipersengketakan antara dua negara sebagai wilayah kedaulatan Australia. Walaupun Timor Lorosa'e enggan menerima Kesepakatan

penyatuan internasional yang memberikan kepada Australia lebih dari empat perlima dari kekayaan Sunrise, negara baru ini belum menarik klaimnya atas wilayah yang dipersengketakan tersebut.

Australia menunda meratifikasi Kesepakatan Laut Timor guna memaksa Timor Lorosa'e untuk menandatangani Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise. Walaupun demikian, Dili telah meratifikasi Kese-

epakatan Laut Timor pada bulan Desember dan sebaliknya pemerintah Australia menolak untuk meratifikasi Kesepakatan itu dengan menunda proses ratifikasi dan mengancam proyek Bayu-Undan. Operator Bayu-Undan ConocoPhillips mengatakan bahwa pelanggan Jepang untuk gas Bayu-Undan barangkali dapat menunda kontrak mereka jika Kesepakatan itu tidak diratifikasi oleh kedua pemerintah sebelum 11 Maret. Karena takut kehilangan proyek Bayu-Undan maka pada tanggal 5 Maret, pemerintah Timor Lorosa'e menyetujui penandatanganan dengan Australia. Setelah persetujuan itu, pemerintah Australia memberikan Kesepakatan Laut Timor kepada Parlemennya untuk diratifikasi. Pada hari berikutnya, Alexander Downer kembali ke Dili untuk menanda-tangani Kesepakatan Penyatuan Internasional ladang sunrise dan pada hari yang sama, Parlemen Australia di Canberra meratifikasi Kesepakatan Laut Timor.

Namun, selama perdebatan mengenai ratifikasi tersebut di dalam Senat Australia, seorang Senator dari Partai Hijau, Bob Brown menjelaskan tentang proses penandatanganan dengan mengatakan:

“Semalam Perdana Menteri (Australia) menggunakan ancaman atau pemerasan terhadap Timor Lorosa'e. ... Motif dari tindakan Perdana Menteri tadi malam ialah untuk memaksa Timor Lorosa'e atas kekayaan dan uang, melalui ancaman untuk menarik legislasi ini jika pemerintah Timor Lorosa'e tidak setuju untuk menandatangani kesepakatan penyatuan internasional hari ini. ... Hari ini Kita sedang memperdebatkan selebar legislasi yang akan melibatkan, menurut Menlu Tuan Downer, suatu rejeki 50 miliar dolar (33 miliar dolar AS) bagi Australia dari eksplorasi ladang-ladang minyak dan gas yang seluruhnya berada di dalam perairan Timor Lorosa'e, menurut tafsiran saya dan tafsiran sejumlah ahli hukum internasional.

“Tetapi selama periode pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e, dan Kesepakatan ini dengan efektif mengeluarkan ladang-ladang itu dan memberikan kepada Australia jika bukan 50-50 maka keuntungan lebih besar lagi dari ladang-ladang minyak itu akan mengalir kepada pemerintah. Jelas, Australia yang sedang terlibat dalam pencurian kekayaan besar-besaran dari negara tetangga kita Timor Lorosa'e yang kecil – tetangga yang paling miskin di antara negara-negara

tetangga lainnya karena salah satu kekayaan yang akan membantu membangkitkan dari dasar diinfasi/ dicaplok oleh salah satu tetangganya yang paling kaya.

“Adalah Perdana Menteri Howard, atas nama perusahaan-perusahaan minyak menelpon Perdana Menteri Timor Lorosa'e, Dr Alkatiri lalu mengatakan kepada Dr Alkatiri, menurut laporan *The Age*, 'Jika Anda tidak menanda-tangani

Kesepakatan pembangunan ladang Greater Sunrise yang merupakan ladang terbesar yang menjadi milik Timor Lorosa'e dan menyerahkan kekayaan tersebut dalam jumlah besar kepada Australia, maka kami tidak akan menyampaikan legislasi ini kepada Senat hari ini,' dan memperbolehkan pembangunan ladang lainnya yang lebih kecil, yang diharapkan oleh pemerintah Timor Lorosa'e agar dieksplorasi. Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri 'Lakukan seperti apa yang kami kehendaki atau kami membatalkan kontrak yang menguntungkan dengan Jepang untuk eksplorasi ladang minyak Bayu-Undan.' ”

Karena kejujurannya, Senator Brown diusir keluar dari Senat selama sisa hari itu.

Kesepakatan Laut Timor mulai berlaku sejak tanggal 2 April setelah Australia merampungkan proses ratifikasinya. Menurut Kesepakatan yang baru itu, Otoritas Pengembangan Minyak Bersama yang lama telah diganti dengan Otoritas perwakilan Laut Timor atau Timor Sea Designated Authority (TSDA), yang akan mengawasi pengeksplorasi minyak dan gas di dalam JPDA. TSDA diarahkan oleh Komisi Bersama

Sumber Informasi

La'o Hamutuk belum lama ini merilis CD-ROM *OilWeb*, suatu rujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan minyak dan gas Timor Lorosa'e. *OilWeb* berisi sejumlah pemaparan pada konferensi Dili, dan juga ratusan dokumen hukum, sejarah dan analisa dan segala yang dipublikasikan *La'o Hamutuk* mengenai hal ini. Sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi sejumlah artikel dalam bahasa Indonesia, Tetun dan Portugis. CD-ROM ini, yang juga menyertakan sebuah film berdurasi 17 menit *Don't Rob Their Future (Jangan Curi Masa Depan Mereka)* dan suatu sandiwara radio dalam bahasa Tetun, tersedia di *La'o Hamutuk* dengan harga 50 dolar untuk lembaga, 2 dolar untuk pegiat Timor Lorosa'e.

La'o Hamutuk juga menulis *Surat Populer* mengenai Celah Timor dalam empat halaman berwarna berbahasa Tetun, yang menjelaskan sejarah dan dilema masalah batas laut dengan Australia. Dimaksudkan sebagai panduan diskusi bagi orang di seantero Timor Lorosa'e.

Laut Timor (Timor Sea Joint Commission) yang memiliki dua ketua komisi (Direktur Eksekutif TSDA Einar Risa dari Norwegia dan Sekretaris Negara urusan Investasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Timor Lorosa'e José Teixeira) yang ditunjuk oleh pemerintah Timor Lorosa'e, dan

komisaris yang lain (John Hartwell dari Departemen Australia untuk Industri, Pariwisata dan Sumber-daya) yang ditunjuk oleh Australia. Walaupun sebagian besar aktivitas kantornya masih berada di Darwin, namun semuanya akan dipindah ke Dili dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun.



Proyek Bayu-Undan yang tengah dilaksanakan

Pada tanggal 16 Mei, TSDA menyetujui Kontrak pembagian hasil bersama dan Pengembangan Rencana Bayu-Undan, kemudian pada tanggal 5 Juni Parlemen Timor Lorosa'e mengesahkan dua undang-undang mengenai pajak yang berkenaan dengan proyek tersebut. Dengan ketentuan hukum yang telah ada, operator Bayu-Undan ConocoPhillips (pemilik proyek 64%), bersama dengan rekan-rekannya Eni/AGIP dari Italia, Santos dari Australia dan INPEX dari Jepang (masing-masing memiliki sekitar 12%) dapat melanjutkan pengeskplorasian mereka. Pada pertengahan bulan Juni, patner-patner perusahaan telah menjual sekitar 10% saham mereka kepada Tokyo Electric Power Company dan Tokyo Gas Company yang akan membeli gas dari Bayu-Undan untuk pemakaian di Jepang.

Timor Lorosa'e diharapkan akan menerima sekitar 3 miliar dolar AS dari bagi hasil dan memperoleh pajak pendapatan selama 20 tahun mendatang dari proyek Bayu-Undan tetapi investasi dan tenaga kerja akan lebih sedikit tersedia di negeri ini. Para patner Bayu-Undan telah berjanji bahwa mereka hanya akan menghabiskan sekitar 57 juta dolar untuk investasi dan pengeluaran di Timor Lorosa'e selama proyek Bayu-Undan berjalan, lebih sedikit 2% dari yang dihabiskan di negara lain. Negara bagian utara Australia yang berpenduduk sekitar seper-empat dari Timor Lorosa'e akan menerima 900 juta dolar dari investasi dan pengeluaran Bayu-Undan. Walaupun beberapa kalangan

berkeyakinan bahwa angka ini terlalu dibesar-besarkan yang jumlahnya lebih besar lima puluh kali lipat lebih tinggi dari per kapita dari jumlah yang diperoleh Timor Lorosa'e dari investasinya.

Konstruksi tahap pertama Bayu-Undan – menyulingkan cairan gas alam (kondensat dan LPG) dari sekitar 24 sumur yang memprosesnya di laut dan diangkut ke para pelanggan berjalan dengan lancar dan akan berproduksi hingga 2004. Gas alam yang disulingkan dalam tahap ini dikompres dan didaur ulang ke dalam penampungan bawah tanah agar selanjutnya diolah lagi pada tahap kedua.

Diagram lukisan pada halaman xx menunjukkan tentang bagaimana proses kompres dan daur ulang dilakukan. Sumur Bayu-Undan terletak pada kedalaman air 80 meter termasuk kerangka hulu sumur dan dua bagian lagi untuk kamar anak buah dan tempat proses. Produksi dan pengangkutan ke dalam tanker minyak yang sebenarnya dilakukan pada penampung terapung dan kapal Bongkar-Muat (FSO yang dirancang secara khusus. Semua kegiatan pengolahan akan dilakukan di laut karena itu sebagian besar peralatan sedang dibuat di Korea Selatan, Singapura dan Indonesia. Walaupun Timor Lorosa'e akan menerima pendapatan 1,8 miliar dolar melalui tahap ini untuk jangka waktu 20 tahun mendatang, hal ini hampir tidak dapat menciptakan lapangan kerja baik di dalam Timor Lorosa'e maupun Australia, kecuali sekitar seratus lapangan kerja akan tersedia di laut. Namun demikian, Timor Lorosa'e akan mendapatkan 90% pendapatan dari pajak

selama kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalam area JPDA.

Tahap kedua, menyulingkan gas alam untuk dijual ke pelanggan di Jepang akan menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 1,2 miliar dolar bagi Timor Lorosa'e. Pembangunan konstruksi baru saja dimulai, karena itu produksinya akan dilakukan pada tahun 2006 dan akan dilanjutkan hingga 2023. Perusahaan-perusahaan yang menjadi operator proyek ini akan memasang pipa gas bawah tanah sepanjang 500-km dari ladang Bayu-Undan ke Darwin, Australia, kemudian gas akan diolah menjadi pencairan gas alam (LNG). Perusahaan Multiplex Constructions dari Australia dan Saipem SpA dari Italia (suatu divisi dari Eni) akan membeli pipa baja dari Jepang lalu membalutnya dengan pelindung baja di Malaysia kemudian meletakkannya di dasar Laut Timor. Biaya instalasi saluran pipa tersebut diperkirakan mendekati 500 juta dolar.

ConocoPhillips belum lama ini telah menanda-tangani sebuah kontrak senilai 1 miliar dolar untuk membangun pabrik di Wickham Point di Darwin guna mencairkan gas alam (yang menghasilkan LNG) untuk selanjutnya akan diangkut ke Jepang. Pabrik tersebut akan dibangun oleh konglomerat bangunan asal A.S. Bechtel, suatu perusahaan yang memiliki sejarah panjang dan kejam. Bechtel yang memiliki ikatan dekat dengan pemerintah Bush baru saja

menerima sebuah kontrak bernilai 680 juta dolar dari pemerintah A.S. untuk membangun kembali infra-struktur di Irak. Walaupun penduduk Darwin prihatin terhadap lingkungan mereka dan telah memprotes pabrik tersebut, konstruksi tetap dimulai pada tanggal 23 Juni lalu dan akan rampung dalam waktu tiga tahun. Proyek-proyek pemasangan pipa dan pabrik pencairan gas alam di Darwin secara ekonomis akan sangat menguntungkan negara bagian Utara Australia, tetapi sangat sulit uang yang dikeluarkan untuk konstruksi dan pengolahan di daratan akan datang ke Timor Lorosa'e.

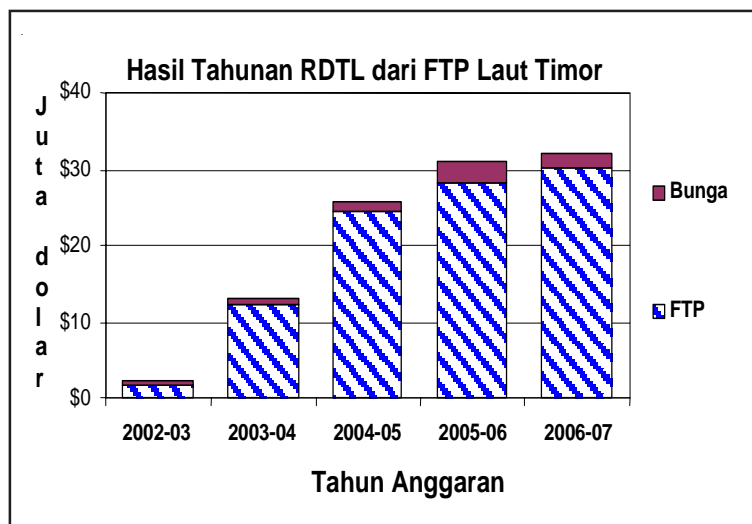
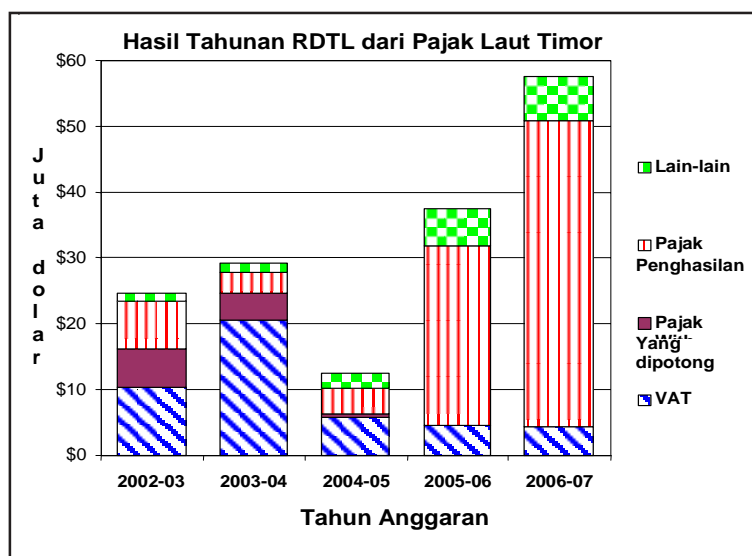
Proyeksi tentang pendapatan

Artikel ini hanya akan mengulas tentang pendapatan yang diharapkan Timor Lorosa'e dari minyak dalam beberapa tahun mendatang; *La'o Hamutuk* akan menyajikannya secara terperinci dalam *Bulletin* mendatang. Berhubungan dengan persoalan-persoalan teknis yang sekarang telah diselesaikan, produksi tahap pertama dari Bayu-Undan akan ditunda untuk beberapa bulan. Penundaan ini akan menimbulkan sejumlah konsekuensi yang serius bagi anggaran pemerintah Timor Lorosa'e untuk perencanaan jangka pendek. Diperkirakan bahwa pendapatan dari minyak Laut Timor untuk periode tiga tahun yakni 2003-2005 telah berkurang sampai 42% (mendekati 30 juta dolar), meskipun di masa mendatang pendapatan tersebut akan tetap tersedia.

Berdasarkan anggaran Timor Lorosa'e untuk tahun 2003-2004, kekayaan Laut Timor dari Elang-Kakatua dan Bayu-Undan ditunjukkan dalam grafik di bagian kiri. Dan hanya pendapatan dari pajak yang ditunjukkan pada grafik paling atas yang digunakan untuk setiap pelaksanaan anggaran tahunan. Uang ini meliputi:

- **Lain-lain:** Pendapatan non pajak dari hasil eksplorasi minyak, terutama pembayaran pemasangan pipa oleh Australia.
- **Pajak penghasilan:** yang dikenakan pada perusahaan minyak dan pekerja di JPDA (90%) dan di Timor Lorosa'e (100%) atas keuntungan yang didapat oleh perusahaan melalui penjualan minyak. Pendapatan Ini akan meningkat ketika produksi minyak meningkat setelah 2006.
- **Pajak awal** yang dikenakan pada kontraktor, dibayar lebih awal oleh pembayar bajak; pajak ini tidak terlalu penting untuk saat sekarang dan selanjutnya.
- **Pajak Tambahan (VAT)** dikenakan pada modal yang diinvestasi dalam konstruksi dan pembangunan platform dan perlengkapan yang lain. Pajak Ini akan berkurang setelah 2004, apabila semua perlengkapan telah dibangun di laut.

Uang dari hasil pembagian keseluruhan minyak dan gas yang didapat oleh Timor Lorosa'e (yang disebut Minyak Tahap Pertama, FTP) diuraikan pada grafik yang paling bawah. Uang ini tidak digunakan untuk anggaran pemerintah Timor Lorosa'e. Tetapi uang itu diinvestasikan dalam dana kapital. Sekarang bunga yang diperolehnya dari dana ini diinvestasikan kembali dan bunga dari uang ini akan menambah pendapatan kepada Timor Lorosa'e selama 30 tahun mulai dari sekarang, setelah minyak dan gas habis dieksplorasi. Dana ini



Sumber: Laporan Pemerintah Timor Lorosa'e kepada Pertemuan Rekan-rekan Pembangunan pada Juni 2003

diproyeksikan untuk mengakumulasi lebih dari 100 juta dolar pada akhir tahun anggaran 2006-7 dan akan bertambah lebih besar sesudahnya; grafik di samping kiri menunjukkan besarnya Minyak Tahap Pertama dan setiap tahun bunganya yang akan disimpan sejak saat itu.

Pendapatan dari Minyak Tahap Pertama akan bertambah secara drastis setelah 2006, saat proyek Bayu-Undan tahap kedua mulai memasuki tahap produksi. Pendapatan dari Bayu-Undan diproyeksikan akan berkontribusi sekitar 1,3 miliar dolar pada dana hibah. Setelah perusahaan perminyakan mendapatkan kembali investasi mereka sebesar tiga miliar dolar, Timor Lorosa'e akan menerima pendapatan tambahan dari keuntungan penjualan minyak, tetapi uang akan diperoleh selama kurang lebih satu dekade lamanya. Ladang gas Bayu-Undan akan berhenti produksinya sekitar 2003, saat semua kondensat dan gas yang akan mendatangkan keuntungan telah habis terjual.

Jika Sunrise memulai produksinya pada 2009, maka gas dari ladang ini dapat memberikan penghasilan untuk 30 tahun mendatang, dengan menambah jumlah dana hibah sekitar 25% sesuai ketentuan Kesepakatan penyatuan yang sekarang. Namun, seandainya Timor Lorosa'e mendapatkan haknya menurut UNCLOS atas sebagian atau seluruh pendapatan dari Sunrise, maka jumlah dana akan bertambah.

Ladang-ladang kecil di dalam Wilayah Eksplorasi Bersama

Selama dua tahun terakhir, pemerintah Timor Lorosa'e telah menerima lebih dari 20 juta dolar per tahun (seperempat dari anggaran nasional) dari pajak konstruksi Bayu-Undan.

Pendapatan ini adalah pendapatan dari Minyak Tahap Pertama khususnya dari ladang-ladang minyak yang lebih kecil dalam Wilayah Eksplorasi Bersama seperti ladang Elang-Kakatua. Ladang ini memulai produksinya pada 1998 dengan menghasilkan uang untuk Indonesia dan Australia tetapi sekarang sekitar 90% dari minyak ini sudah dieksplorasi. Dengan ratifikasi Kesepakatan Laut Timor, Timor Lorosa'e menerima 90% pendapatan dari ladang ini sejak 20 Mei 2002, dan 50% pendapatan diperoleh sekitar akhir tahun 1999 dan hari kemerdekaan. Selama ini Timor Lorosa'e telah menerima 10,3 juta dolar dari pendapatan Minyak Tahap Pertama dari Elang-Kakatua, 71% dari jumlah tersebut dibayarkan pada saat pemerintahan UNTAET, jumlah yang lainnya diterima dalam bentuk pajak. Sebelum akhir 1999, Indonesia mendapatkan 50% dari pajak dan hasil, sekitar 8 juta dolar, dan pelaku pendudukan ilegal tersebut belum selesai dalam urusan kekayaan curiannya.

Sekarang Elang-Kakatua sudah mendekati kehabisan produksinya, demikian juga ladang minyak Laminaria-Corallina. Peralatan yang telah digunakan untuk menyulingkan minyak dari ladang-ladang tersebut tidak lama lagi akan tersedia, sehingga menghemat eksplorasi ladang-ladang yang lebih kecil di dalam JPDA, terutama Kuda Tasi dan Jahal. Kongsi usaha yang akan mengeksplorasi ladang-ladang ini akan dilaksanakan oleh perusahaan perminyakan Woodside (dengan saham 40%), dan juga termasuk Inpex (35%) dan Santos (25%). Jika perhitungan Woodside benar maka ladang-ladang ini akan memberikan sekitar 100 juta dolar bagi Timor Lorosa'e selama 2005-2007, tetapi hal itu tidak ditunjukkan pada grafik-grafik di atas karena rencana pengembangan belum dirancang.

Kesepakatan Penyatuan Sunrise ditanda-tangani

Ladang gas Greater Sunrise yang meliputi ladang-ladang Sunrise dan Troubadour letaknya sekitar seper-lima di dalam JPDA dan seluruhnya berada dalam wilayah Timor Lorosa'e berdasarkan garis tengah antara Timor Lorosa'e dan Australia. Ladang ini mengandung kandungan gas dua kali lipat lebih besar dari minyak dan gas Bayu-Undan yang nilainya kurang lebih sekitar 30 miliar dolar. Perusahaan-perusahaan minyak yang dipimpin oleh Woodside Australian Energy menginginkan agar seluruh ladang tersebut diatur dalam satu regulasi dan perpajakan. Ladang-ladang yang melintas batas sering disatukan dengan memperlakukan seluruh ladang menjadi satu ladang yang dioperasikan untuk tujuan legal, tetapi membagi hasil dari ladang tersebut dengan dua atau lebih negara. Ketika Timor Lorosa'e dan Australia menanda-tangani Kesepakatan Laut Timor pada bulan Mei 2002, dua Perdana Menteri juga menanda-tangani satu Nota Kesepahaman bahwa dua negara "akan bekerja sama secara efektif dan dengan etiket baik untuk merampungkan kesepakatan penyatuan internasional (bagi ladang gas Greater Sunrise) ... sebelum 31 Desember 2002."

Seperti telah digambarkan di muka, serangkaian perundingan tersebut berjalan lama dan sulit. Walaupun Timor Lorosa'e ditekan untuk menandatangani kesepakatan penyatuan internasional (IUA) yang memberikan keuntungan

kepada Australia sebesar 4-1, negara baru ini menolak menyerahkan klaim wilayahnya begitu saja. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 6 Maret 2003, dan pada hari yang sama pihak Australia meratifikasi Kesepakatan Laut Timor.

Pada peta di samping kanan, penyatuan area yang termuat dalam kesepakatan itu berada dalam garis putus-putus yang mencakup seluruh ladang Sunrise dan Troubadour. Garis diagonal yang dibengkokkan menandai tepi dari Area Eksplorasi Minyak Bersama (JPDA). Pendapatan sebesar 79,9% dari ladang-ladang ini berada di luar JPDA (di sebelah kanan pada peta) di-"distribusikan ke Australia." Hanya 20,1% dari ladang ini terletak di daerah eksplorasi minyak bersama dan karena pendapatan dari Wilayah pengembangan minyak bersama dibagi 90% kepada Timor Lorosa'e dan 10% kepada Australia maka Australia akan menerima sekitar 81,91% (79,9% + 2,01%) dari pendapatan ladang Sunrise kemudian hanya sisanya sebesar 18,09% yang diberikan kepada Timor Lorosa'e. Kesepakatan Penyatuan internasional memungkinkan penyesuaian ratio sebesar 79,9/20,1 di masa mendatang yang berdasarkan pada teknis evaluasi ulang mengenai seberapa banyak gas yang terletak di dalam dan di luar JPDA.

Jika batas perairan atau batas laut disepakati, dengan

sendirinya Kesepakatan Laut Timor tidak berlaku lagi lalu kedua negara akan “mempertimbangkan kembali” Kesepakatan penyatuan Sunrise, walaupun kontrak perusahaan-perusahaan minyak tidak akan berubah, kecuali mengenai cara alokasi pembayaran kepada tiap negara. Jika penyelesaian batas laut tidak tercapai maka Kesepakatan penyatuan internasional akan tetap berlaku untuk selamanya dan Kesepakatan Laut Timor akan berakhir selama 30 tahun yang mana selama itu pula minyak di Laut Timor mungkin sudah habis dieksplorasi.

Kesepakatan penyatuan internasional menghasilkan tiga anggota Komisi Sunrise (dua orang ditunjuk oleh Australia dan seorang lagi ditunjuk oleh Timor Lorosa'e) untuk mengawasi pengeksplorasi ladang tersebut. Hukum keselamatan, kesehatan dan lingkungan Australia akan diterapkan untuk seluruh ladang. Hukum perpajakan Australia juga akan diterapkan atas 79,9% kegiatan-kegiatan di ladang tersebut, seakan hukum perpajakan yang termuat dalam Kesepakatan Laut Timor akan diterapkan atas 20,1% kegiatan di ladang tersebut.

Proyek Greater Sunrise dioperasikan oleh Woodside Australian Energy dengan memiliki saham sebesar 33% atas ladang tersebut bersama dengan rekan seusaha Conoco-Phillips (30% saham), Royal Dutch Shell (27% saham) dan Osaka Gas (10% saham). Walaupun eksplorasinya sedang berjalan, perusahaan-perusahaan tersebut belum menandatangani kontrak untuk memulai

konstruksi. Rencana pembangunan awal belum disepakati, dan produksinya sendiri akan bisa dimulai awal tahun 2009.

Woodside dan Shell sedang mempertimbangkan untuk mencoba menggunakan industri pencairan gas terapung pertama di dunia (lihat gambar di atas). Industri tersebut akan dibangun dan dioperasikan oleh Shell dengan membeli gas dari kongsi usaha/usaha bersama, memproses dan mencairkannya di laut kemudian langsung memuatnya ke dalam tanker gas lalu dibawa ke Jepang atau pelanggan lainnya. Proyek ini akan menambah pengeluaran tambahan dan resiko lainnya dalam satu teknologi yang belum diuji coba sebelumnya. Karena sebagian besar konstruksinya akan dilakukan di negara-negara Asia lainnya maka baik Timor Lorosa'e maupun Australia tidak akan memperoleh pendapatan dari investasi, pajak atau hasil tenaga kerja. Industri pencairan gas terapung kemungkinan akan ditempatkan di luar daerah kerja sama atau di luar Timor Gap sebagai bagian dari Kesepakatan penyatuan internasional dan oleh karena itu pajak atas investasi modal dan kontruksi hanya akan membayar kepada Australia.

Persoalan lain adalah pemerintah negara bagian Australia Utara menginginkan Gas Sunrise disalurkan melalui pipa ke Darwin, barangkali sama seperti sistem pemipaan yang

digunakan untuk proyek Bayu-Undan dengan demikian Australia bisa memperoleh pajak dan tenaga kerja yang lebih banyak. Belum lama ini, ConocoPhillips mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mendukung konsep ini dengan mengatakan bahwa Woodside dan kongsi usahanya tidak melihat hal itu sebagai suatu pilihan ekonomis.

Opsi kegiatan yang dianjurkan oleh beberapa konsultan industri minyak adalah pemasangan pipa dari Sunrise ke daratan yang paling dekat yakni pantai selatan di Timor Lorosa'e dengan membangun pabrik cairan gas alam. Hal ini akan lebih menguntungkan Timor Lorosa'e dan lebih ekonomis bagi perusahaan-perusahaan minyak, tetapi hal ini juga merupakan pemasangan pipa paling dalam di dasar laut yang pernah dibangun. Pakar yang lain menyarankan agar menggunakan pipa yang berukuran kecil untuk menyalurkan gas sunrise menuju kepada Timor Lorosa'e untuk kebutuhan dalam negeri, atau membangun pabrik pencairan gas alam di Tassie Shoal, laut dangkal antara Sunrise dan Australia. Dalam membuat keputusan tentang pengembangan Sunrise yang

bernilai miliaran dolar tersebut, perusahaan minyak harus mempertimbangkan faktor-faktor seismik, geologis, ekonomis dan politis. *La'o Hamutuk* akan memuat hal ini secara mendalam di *Bulletin* di masa mendatang.

Kesepakatan penyatuan internasional yang ditanda-tangani pada Maret tidak mencantumkan apapun tentang opsi-opsi pembangunan. Tetapi, kesepakatan ini

malah disertakan dengan satu Nota Kesepahaman antara dua negara: jika Industri Pencairan Gas Terapung dibangun di luar Wilayah pengembangan minyak bersama, Australia bersedia untuk membayar 1 juta dolar per tahun kepada Timor Lorosa'e selama proses pembangunan berjalan dan 10 juta per tahun selama Sunrise memproduksi gas sebagai kompensasi kepada Timor Lorosa'e karena memberikan hak perpajakannya kepada industri terapung.

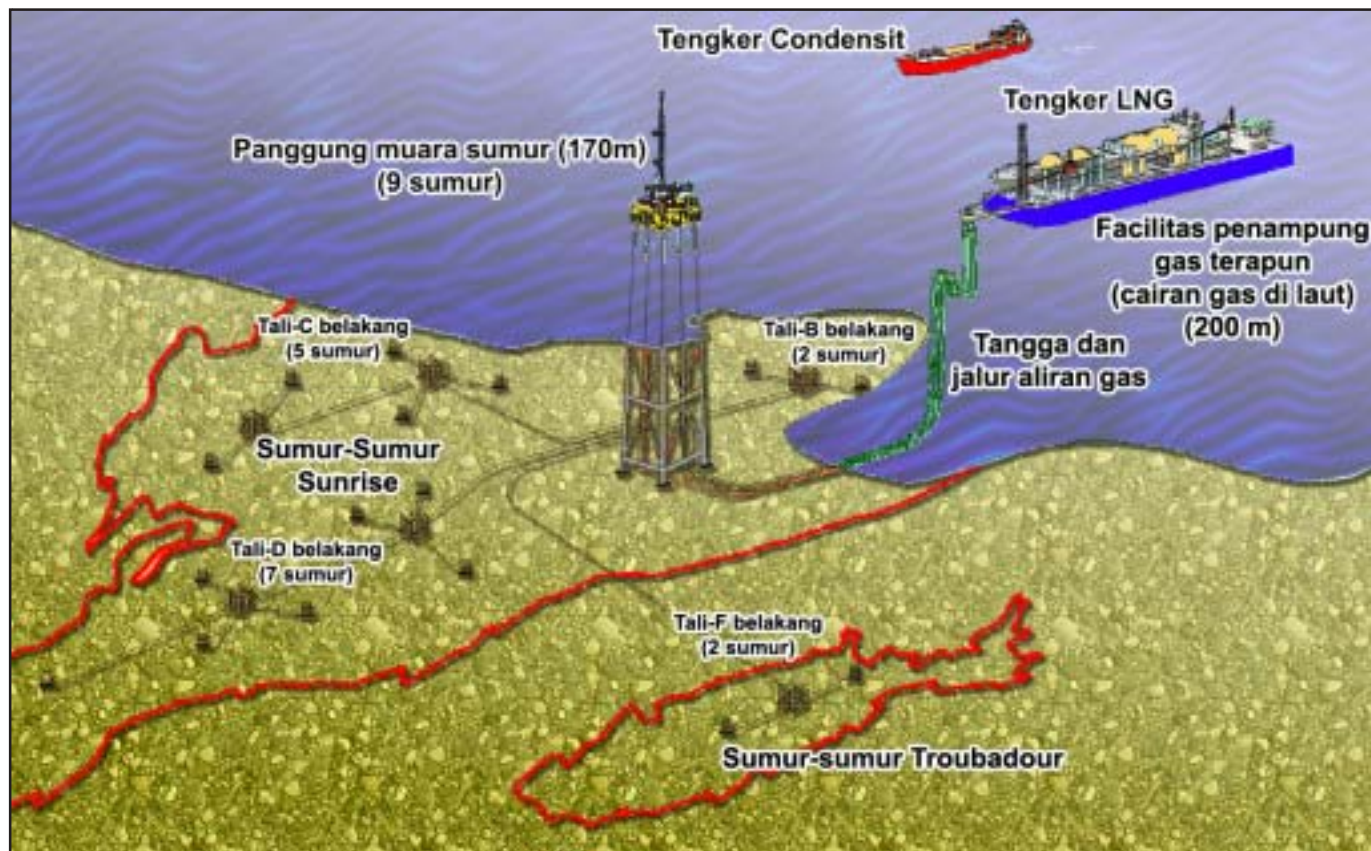
Sebelum Kesepakatan penyatuan internasional Sunrise berlaku, kesepakatan tersebut harus diratifikasi lebih dulu oleh parlemen dari dua negara. Parlemen Australia telah memulai proses tersebut dengan menerima kesaksian (dari *La'o Hamutuk* dan Pusat Informasi Independen untuk Laut Timor, di antara kesaksian lainnya) dan mengadakan dengar pendapat umum.

Dilain pihak, Timor Lorosa'e tidak perlu terburu-buru untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Pemerintah Dili belum mengirim kesepakatan penyatuan internasional ini ke Parlemen dan pemerintah bisa menunda proses ini agar mendorong Australia untuk membicarakan persoalan batas-batas laut. Dan bahkan setelah kesepakatan tersebut diratifikasi, Timor Lorosa'e masih dapat menggunakan kekuasaannya dalam Otoritas perwakilan yang mengatur tentang Wilayah pengembangan minyak bersama untuk



menghindari eksplorasi Sunrise. Bayu-Undan akan memberikan hasil yang memadai bagi Timor Lorosa'e selama dua dekade mulai dari tahun 2006 dan Timor Lorosa'e tidak

membutuhkan pendapatan dari Sunrise selama Bayu-Undan sedang dalam produksi gas secara penuh.



Australia Menghambat Batas Negara

Timor Lorosa'e sebagai sebuah negara baru yang berdaulat berhak memiliki batas-batasnya atas darat, laut dan udara. Negara ini mulai mendefinisikan batas-batasnya dengan mengesahkan Hukum Laut pada bulan Oktober 2002. Karena Timor Lorosa'e belum mempunyai batas perairan nasional, maka harus ada satu kesepakatan tentang batas yang jelas dengan negara-negara tetangganya seperti Australia dan Indonesia. Setiap negara hendaknya menyelesaikan perbatasan melalui negosiasi-negosiasi dan mekanisme legal yang diterima secara internasional.

Bagi Timor Lorosa'e, penyelesaian batas negara merupakan implementasi nilai-nilai perjuangan nasional untuk kemerdekaan. Penyelesaian batas negara merupakan kepentingan nasional untuk melindungi kedaulatan dan martabat bangsa agar memiliki aturan hukum yang mengatur tentang perairan laut dan darat serta melindungi hak negara untuk menggunakan kekayaan alam dan melindungi lingkungan hidup.

Persoalan Laut Timor adalah persoalan yang penting untuk menentukan perbatasan antara Australia dan Timor Lorosa'e. Indonesia dan Australia menarik garis batas perairan di Laut Timor ketika Timor Lorosa'e masih berada di bawah penjajahan Portugis dan pendudukan Indonesia, sayangnya garis-garis ini diterima oleh pemerintah transisi PBB dan sampai sekarang pun masih sedang digunakan, walaupun garis-garis tersebut tidak mencerminkan kedaulatan Republik Demokratik Timor Lorosa'e.

Dengan semangat memperkuat jalinan keamanan, perdamaian, kerjasama dan hubungan baik dengan Australia,

Timor Lorosa'e telah berulang-kali meminta Australia agar membicarakan persoalan batas Laut Timor. Sebulan setelah kemerdekaan tahun lalu, Perdana Menteri Mari Alkatiri menjelaskan di Australia bahwa Timor Lorosa'e merupakan suatu negara berdaulat, dan batas laut harus diselesaikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional.

Disamping pemerintah Timor Lorosa'e, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Timor Lorosa'e mendukung upaya ini. Tahun lalu, 13 organisasi masyarakat sipil membentuk satu koalisi "Pusat Informasi Independen Timor Lorosa'e untuk Laut Timor" (CIITT) untuk mendesak pemerintah Australia dan pemerintah-pemerintah dunia guna menyelesaikan perbatasan laut sebelum melakukan eksplorasi minyak dan gas di dalam Laut Timor.

Akan tetapi, Pemerintah transisi di bawah pemerintahan UNTAET gagal memulai proses penyelesaian perbatasan dengan Australia. Namun sebaliknya, PBB malah berunding dengan Australia untuk tetap melakukan eksplorasi ilegal minyak dan gas di Celah Timor tanpa mengidentifikasi wilayah negara mana dan batas dasar lautnya di mana.

Sejak kemerdekaan Timor Lorosa'e, pemerintah Australia telah menolak mendiskusikan perbatasan laut. Buktinya, Australia dengan tidak bersahabat manakuti Timor Lorosa'e dalam persoalan Kesepakatan Laut Timor. Pada bulan Maret 2002 sebelum Kesepakatan Laut Timor ditanda-tangani, Australia menarik diri dari aturan-aturan Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) dan Pengadilan Konvensi Hukum Laut PBB/

UNCLOS untuk arbitrase inparial mengenai batas-batas laut. Hal ini mempersulit Timor Lorosa'e untuk menggunakan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa batas laut jika negosiasi mengalami kegagalan.

Para pejabat Australia berulang-kali menyatakan bahwa mereka mempunyai kepedulian atas kemakmuran, stabilitas dan demokrasi untuk rakyat Timor Lorosa'e. Oleh karena itu, Australia ingin membantu Timor Lorosa'e dalam rekonstruksi dan pembangunan nasional. Paul Foley, Duta Besar Australia untuk Timor Lorosa'e, mengatakan bahwa "Australia adalah negara tetangga yang paling baik terhadap Timor Lorosa'e, oleh karena itu Australia mempunyai kepentingan dalam kesejahteraan rakyat Timor Lorosa'e, keamanan, perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia."

Menteri luar negeri Australia Alexander Downer ketika tiba di Dili dalam rangka menghadiri negosiasi Kesepakatan penyatuan internasional mengatakan kepada Mari Alkatiri: "Bukan hanya satu tetapi dua area yang belum diselesaikan: Kesepakatan penyatuan Internasional dan negosiasi mengenai batas laut. Dengan etiket baik kami sangat setuju untuk mulai negosiasi ulang." Tuan Downer berkali-kali menyebutkan "negosiasi ulang" mengenai batas laut, tetapi kenyataannya Timor Lorosa'e belum pernah memiliki batas laut dan hal inilah yang akan dinegosiasi, bukan melakukan negosiasi ulang. Delapan bulan kemudian, "kesepakatan mutlak" Downer belum berubah wujud dalam negosiasi.

Sayangnya, Australia memprioritaskan kesejahteraan ekonominya ketimbang negara tetangganya yang paling miskin. Ladang minyak Laminaria-Corallina yang berada dalam perairan yang disengketakan oleh dua negara tetapi lebih dekat dengan Timor Leste ketimbang ke Australia, telah memproduksi minyak pada bulan November 1999, walaupun pada saat itu asap masih mengepul dari puing-puing reruntuhan di Timor Lorosa'e. Menjelang akhir 2002, ladang-ladang ini telah menghasilkan lebih dari 5 miliar dolar dari hasil penjualannya, dan lebih dari 2/3 dari minyak telah disulingkan. Perusahaan-perusahaan (Woodside, Shell, dan BHP) yang mengeksplorasi Laminaria-Corallina telah membayar lebih dari 1 miliar dolar kepada pemerintah Australia tetapi tidak satu sen pun diberikan kepada Timor Lorosa'e. Jika dikemudian hari, perbatasan yang adil disepakati, Australia secara moral berutang pada Timor Lorosa'e, walaupun sulit bagi Timor Lorosa'e untuk mendapatkan kembali uang ini.

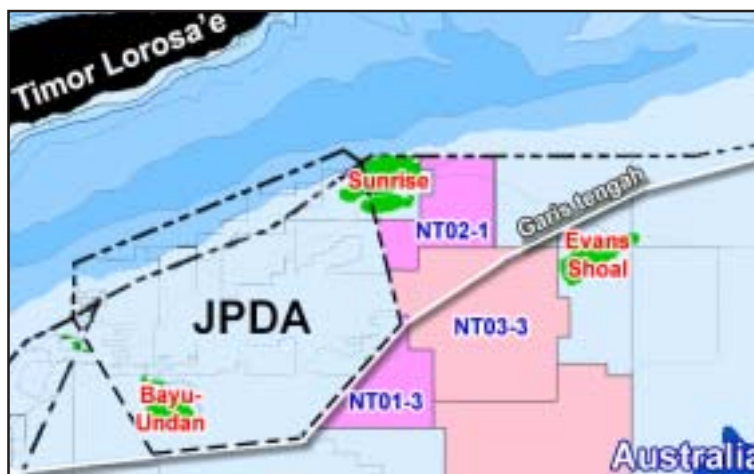
Kebijakan-kebijakan Australia yang sekarang masih tetap melanjutkan doktrin penjajah yakni *terra nullius* ("tanah kosong") yang digunakan oleh orang-orang Eropa untuk membenarkan dalam mendiami Australia 200 tahun lalu, mencaplok tanah dan kekayaan alam dari orang-orang pribumi yang telah tinggal di sana selama beribu-ribu tahun dengan berpura-pura bahwa orang-orang ini bukan manusia dan tidak pernah ada.

Australia tetap menada-tangani dan menawarkan kontrak kepada perusahaan perminyakan untuk mengeksplorasi minyak yang ada di wilayah yang dipersengketakan yang sebenarnya berada wilayah Timor Lorosa'e berdasarkan prinsip-prinsip

garis tengah. Sebagaimana yang diperlihatkan dalam peta pada halaman ini semua area NT02-1 dan bagian NT03-3, yang ditawarkan oleh Australia kepada perusahaan-perusahaan perminyakan pada tahun 2002 dan 2003, bisa saja berada di dalam wilayah Timor Lorosa'e sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut PBB.

Walaupun Kesepakatan Laut Timor dan Kesepakatan penyatuan internasional Sunrise menyatakan "tanpa merugikan" penyelesaian batas laut di masa mendatang, namun tindakan Australia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa seolah-olah seluruh wilayah yang belum dikuasai oleh Timor Lorosa'e adalah bagian dari Australia dengan mengabaikan aturan hukum dan komitmen internasional Australia.

Jika Australia hendak membantu Timor Lorosa'e dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan dan stabilitas, Australia harus memperlihatkan sikap yang bersahabat, demokratis dan beradab kepada tetangga barunya yang miskin. Tetapi dalam kenyataannya, Australia sedang mengeruk uang dari kekayaan laut Timor yang dipersengketakan itu, dan menanggukkan penyelesaian perbatasan dengan Timor Lorosa'e dan barangkali hingga seluruh minyak dan gas habis dieksplorasi.



Perkembangan-perkembangan yang lain

Pada tanggal 3 Februari 2003, Pengadilan Federal Australia menolak gugatan hukum yang diajukan oleh PetroTimor terhadap Australia dan Phillips Petroleum. PetroTimor adalah sebuah perusahaan perminyakan yang berbasis di A.S. telah mendapatkan konsesi eksklusif dari Portugal pada tahun 1974 untuk mengeksplorasi minyak di Laut Timor. (Lihat *Buletin La'o*

Hamutuk, Vol. 3, No. 4). Perusahaan tersebut meminta ganti rugi atas pengambil-alihan hak-haknya tetapi pengadilan tersebut memutuskan bahwa badan itu tidak memiliki yurisdiksi hukum tentang keabsahan konsesi yang diberikan oleh negara lain. Walaupun para pejabat PetroTimor telah mengatakan bahwa mereka akan naik banding tetapi tidak ada upaya naik banding yang telah diajukan atau diberita-acarakan.

Selama minggu pertama bulan Maret, bersamaan dengan Australia yang menakut-nakuti Timor Lorosa'e agar menanda-tangani Kesepakatan Penyatuan Sunrise, Departemen Pertambangan dan Sumber Daya Alam Timor Lorosa'e mengadakan konferensi tiga hari di Dili mengenai *Peluang dan Tantangan bagi Sektor Pertambangan Minyak dan Gas di Timor Lorosa'e*. Sebagian besar pembicara dan makalah-makalah mereka memaparkan persoalan yang diulas dalam artikel ini. Salah satu pembicara, pengacara internasional berkebangsaan Kanada, Jeffrey Smith juga berbicara pada pertemuan publik yang diselenggarakan oleh *La'o Hamutuk*. Konferensi tersebut merupakan puncak dari pelatihan berbulan-bulan dalam bidang pengembangan keterampilan bagi staff departemen tersebut. USAID menyediakan 240.000 dolar bagi proyek tersebut, dimana dari jumlah tersebut sebesar 31.000 dolar digunakan untuk konferensi. Hampir setengah dari dana tersebut dikeluarkan untuk Hotel Timor.

Daftar Istilah Minyak dan Gas

Persamaan Barel Minyak (BOE): Satu unit yang menggambarkan jumlah energi yang terkandung di dalam cadangan minyak dan gas alam. Unit ini memungkinkannya penambahan cadangan dari produksi yang berbeda yang sama dalam istilah minyak mentah. Satu triliun kubik kaki (TCF) gas alam kira-kira sebanding dengan 180 juta BOE (mmBOE). Satu BOE bernilai 5-10 dolar dari hasil pemerintah, tergantung pada harga minyak dunia, biaya produksi, tingkat pengenaan pajak, dll.

Kondensat : minyak ringan (disebut gazolin alam) yang terbentuk dari komponen gas alam paling berat. Kondensat ini ditemukan beberapa ladang gas termasuk Bayu-undan dan Sunrise. Kondensat dapat disuling dan digunakan sebagai bahan bakar cairan atau minyak kimiawi tanpa harus mengolah minyak mentah yang paling berat. Kondensat dapat diolah di laut kemudian dimuat ke dalam kapal lalu dibawa ke pelanggang. Nilai pasarnya hampir sama seperti minyak mentah yang lebih tinggi dari gas.

ConocoPhillips: perusahaan minyak terbesar ke-enam dunia berbasis di Texas, AS. Pada tahun 2002 perusahaan ini merger atau bergabung dengan Phillips Petroleum (yang sudah lama terlibat dalam proyek Laut Timor) lalu Conoco dibentuk menjadi ConocoPhillips dan menjadi operator serta pemilik saham terbesar untuk proyek Elang-Kakatua dan Bayu-Undan di dalam JPDA, juga memiliki 30% saham pada Greater Sunrise.

Prinsip landas kontinental: Sekarang prinsip ini tidak dipakai lagi untuk menentukan batas laut antara dua negara tetangga dengan menggunakan kedalaman air untuk menentukan batas antara mereka. Air yang kedalamannya kurang dari 200 meter (landas kontinental) diklaim sebagai ekspansi alamiah daratan teritorial suatu negara. Kesepakatan tahun 1972 tentang batas dasar laut antara Indonesia dan Australia yang mengikuti kedalaman air antara mereka itu merupakan kesepakatan yang berdasarkan pada prinsip landas kontinental. Banyak geolog atau ahli geologi yang mengatakan bahwa Timor Lorosa'e adalah bagian dari landas kontinental Australia yang tidak mempunyai batas landas kontinental antara dua negara. Ketika Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dibuat maka dengan sendirinya prinsip landas kontinental telah diganti dengan prinsip garis tengah/median line yang berpatokan pada jarak dari garis pantai.

Downstream: pengilangan atau bagian dari proses pencairan minyak, mengolah minyak atau gas yang dipompa dari sumurnya ke dalam suatu bentuk atau produk yang dapat dibawa dan dijual ke pelanggang.

Zona Ekonomik Eksklusif (EEZ): suatu wilayah laut dan dasar laut yang menghubungkan darat dari suatu negara di mana negara tersebut memiliki hak untuk mengeksplorasi dan menjual kekayaan yang ada di dalamnya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, zona ekonomi eksklusif biasanya meliputi 200 mil nautik (370 km) dari pantai. Bila dua negara tetangga memiliki jarak kurang dari 400 mil, suatu proses negosiasi dan/atau arbitrase dapat memutuskan batas antara zona ekonomi eksklusif, yang biasanya terdapat di sepanjang garis tengah.

Pendapatan dari Minyak Tahap Pertama (FTP) (yang juga disebut pembagian produksi): Suatu persentase uang yang diterima dari hasil penjualan minyak yang dibayarkannya kepada pemerintah atas wilayahnya dimana minyak disulingkan. Pembayaran ini dimulai pada saat produksi minyak dimulai. Ini merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan pemerintah dari hasil eksplorasi minyak;

sama dengan jumlah yang dapat diperoleh dari laba minyak dan pajak. Pemerintah Timor Lorosa'e telah memutuskan untuk tidak menggunakan hasil FTP untuk membiayai pengeluaran anggaran tahunan, tetapi pemerintah akan menginvestasikannya untuk masa depan.

Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ): Suatu Mahkamah di Den Haag, Belanda di mana pemerintah dari negara-negara di dunia ini dapat mengajukan kasus-kasus sipil terhadap sesamanya. ICJ sering berfungsi sebagai mediator atau arbitrator dalam masalah sengketa batas laut. Pada bulan Maret 2002, Australia mengatakan bahwa negara itu tidak akan menerima proses ICJ untuk mengarbitrase batas-batas laut.

Kesepakatan Penyatuan Internasional: Suatu kesepakatan antara dua negara untuk mengeksplorasi ladang minyak atau ladang-ladang yang melewati batas tertentu sebagai suatu entitas tunggal yang menggunakan sistem hukum tunggal, pajak, aturan lingkungan, aturan keselamatan, undang-undang perburuhan dan lainnya atas ladang tersebut. Bila suatu ladang dieksplorasi sebagai suatu proyek, ladang itu akan menjadi imparial terhadap peraturan yang berbeda untuk diterapkan pada perbedaan aturan dari garis khayali di tengah laut.

Daerah Pengembangan/Eksplorasi Minyak Bersama: Satu wilayah perairan di laut Timor antara Australia dan Timor Lorosa'e namun lebih dekat dengan Timor Lorosa'e. Daerah kerja sama ini pertama kali ditentukan dalam pakta atau kesepakatan Timor Gap tahun 1998 (antara Australia dan Indonesia) sebagai zona kerja sama yakni zona A, yang kemudian dikembangkan atau dimasukkan kembali ke dalam kesepakatan laut Timor (antara Australia dan Timor Lorosa'e). Sekarang wilayah ini benar-benar dikelola bersama antara Australia dan Timor Lorosa'e dimana Timor Lorosa'e menerima 90% pendapatan dari kerja sama itu sebagai pendapatan bagi pemerintah.

Kongsi usaha: Koalisi antara perusahaan-perusahaan minyak dimana sejumlah perusahaan memiliki saham dari suatu proyek atau usaha. Semua proyek yang sekarang sedang dikembangkan di Laut Timor dilakukan dengan cara usaha bersama dengan menanda-tangani kontrak eksplorasi dan bagi hasil dengan pemerintah atau badan-badan dua-negara (seperti TSDA).

Pencairan: suatu proses pengolahan gas alam menjadi cairan gas alam yang dilakukan dengan pabrik yang besar. Walaupun pencairan gas alam di Bayu-Undan akan dilakukan di daratan di Darwin, namun perusahaan perminyakan Shell sedang mengusulkan untuk melakukan pencairan gas dari Greater Sunrise di atas laut setelah membangun industri pencairan gas terapan pertama di dunia.

Pencairan Gas Alam: gas alam yang telah dikompres dan didinginkan ke dalam bentuk cairan. Hal ini membutuhkan penampung atau pengapalan gas yang cukup lama.

Cairan minyak gas (LPG): Propane dan butane; lihat cairan gas alam.

Prinsip Garis Tengah: aturan hukum yang sah untuk menyelesaikan batas laut bila dua negara saling mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB dan sejumlah keputusan pengadilan internasional, batas antara dua negara harus ditentukan pada garis tengah pantai dari dua negara tersebut.

Gas alam: sumber minyak yang ditemukan di bawah tanah di dalam sebuah tempat seperti gas yang terdiri dari methane dan ethane dengan sejumlah hidrokarbon yang paling berat.

Cairan gas alam: komponen paling berat dari gas alam yang

disulingkan melalui pendingan yang terdiri dari cairan minyak gas (Propane dan butane) dan kondensat (pentane dan hidrokarbon yang paling berat)

Operator: Perusahaan perminyakan yang merupakan bagian dari kongsi usaha (sering merupakan pemegang saham terbesar) dan bertanggungjawab atas eksplorasi, pengeboran, konstruksi dan pengoperasian fasilitas-fasilitas pengolahan. Tetapi semua kongsi usaha biasanya mengambil keputusan-keputusan penting bersama-sama dan masing-masing memiliki satu suara sesuai dengan saham mereka. ConocoPhillips dan Woodside Australian Energy merupakan operator dari proyek-proyek minyak lepas pantai yang berkaitan dengan Timor Lorosa'e.

Minyak: Cairan atau bahan bakar fosil berbentuk minyak yang ditemukan di bawah tanah. Minyak ini terdiri minyak mentah, kondensat, cairan minyak ga dan gas alam.

Phillip Petrpleum: lihat Conoco Phillip

Kontrak pembagian hasil: kontrak antara satu atau lebih perusahaan perminyakan (lihat kongsi usaha) dan badan-badan pemerintahan untuk mengeksplorasi sumber minyak dalam ladang-ladang yang ditentukan dan untuk menjual minyak yang ditemukan di sana. Dengan ketentuan kontrak pembagian hasil ini maka pemerintah memiliki sumber minyak di dalam tanah tetapi minyak bukan milik perusahaan minyak. Perusahaan bertindak sebagai kontraktornya pemerintah yang dibayar atas pelayanan mereka dengan bagi hasil. Australia, UNTAET dan sekarang Timor Lorosa'e telah berjanji kepada perusahaan minyak bahwa kontrak pembagian hasil yang ditandatangani dibawah pendudukan Indonesia akan tetap diakui bahkan jika wilayah atau pendapatan diberikan kembali.

Keuntungan minyak (juga disebut Minyak Tahap Kedua): Jika perusahaan-perusahaan minyak telah menjual minyak untuk mendapatkan kembali uang mereka yang diinvestasikan untuk proyek tertentu setelah itu hasil penjualan tambahan dibayarkan kepada pemerintah dimana minyak tersebut dieksplorasi dalam wilayahnya. Hal ini disebut laba atau keuntungan minyak, dan sebagai tambahan dari penjualan minyak tahap pertama/ FTP yang dibayarnya pada awal produksi. Perusahaan-perusahaan juga membayar pajak penghasilan atau otoritas pajak atas keuntungan bersih atau net profit, setelah menutupi pengeluaran-pengeluaran operasional.

Kesepakatan batas dasar laut: Ditanda-tangani pada tahun 1972 antara Australia dan Indonesia. Kesepakatan ini menentukan garis batas antara kedua negara, hak-hak atas kekayaan dasar laut (dasar lautan samudera) dengan menggunakan prinsip landas kontinental melalui Palung Timor yaitu air laut yang paling dalam di antara kedua negara. Portugal yang ketika itu sedang memerintah Timor Lorosa'e menolak untuk berpartisipasi dalam negosiasi tersebut, sehingga terdapat suatu celah dalam laut Timor Lorosa'e. Pada tahun 1997, Australia dan Indonesia menanda-tangani Kesepakatan yang lain dengan menentukan batas air laut (termasuk ikan dan lainnya.) dan sumber-sumber kekayaan di sepanjang garis tengah sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih modern (Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS), tetapi perjanjian tersebut tidak pernah diratifikasi karena kemerdekaan Timor Lorosa'e.

Pembagian hasil/produksi: lihat minyak tahap pertama.

Kesepakatan Celah Timor: Ditanda-tangani oleh Australia dan Indonesia pada 1989 agar kedua negara bisa mengeksplorasi minyak secara ilegal dalam wilayah dasar laut Timor Lorosa'e untuk jangka waktu 40 tahun. Kesepakatan ini menutup Celah Timor di dalam batas dasar laut antara Australia dan Indonesia dengan mendefinisikan Zona Kerjasama yang dinamakan Area Eksplorasi Minyak Bersama (JPDA). Pada bulan Oktober 1999, Kesepakatan Celah Timor tidak berlaku lagi ketika Indonesia tidak lagi mengklaim Timor Lorosa'e.

Otoritas Eksplorasi Laut Timor (TSDA): Badan pengatur Daerah Eksplorasi Minyak Bersama/JPDA sekarang, yang didirikan melalui Kesepakatan Laut Timor dimana badan ini sebagian besar dikontrol oleh Timor Lorosa'e.

Pakta atau Kesepakatan laut Timor: Ditandatangani oleh Australia dan Timor Lorosa'e pada bulan Mei 2002 dan kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2003. Sebenarnya Kesepakatan ini masih melanjutkan daerah kerja sama yang disepakati antara Australia dan Indonesia dalam kesepakatan/pakta Timor Gap, tetapi Timor Lorosa'e hanya menggantikan kembali kedudukan Indonesia kemudian diberikan pendapatan sebesar 90% kepada pemerintah. Kesepakatan laut Timor tidak berlaku setelah 30 tahun atau setelah batas laut yang permanen disepakati antara kedua negara namun tergantung pada mana yang (habis eksplorasi selama 30 tahun atau kesepakatan tentang batas permanen) bisa duluan.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS): Ditanda-tangani di Montego Bay, Jamaica, pada tahun 1982 yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia ini. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1994. Kesepakatan ini menentukan hukum bagi sebagian besar persoalan yang berkaitan dengan laut termasuk penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dan prosedur-prosedur penentuan batas-batas laut menurut prinsip garis tengah. Konvensi ini juga memuat tentang pengadilan (mahkamah) untuk penyelesaian sengketa, yang mana Australia telah menarik diri dari ketentuan ini pada bulan Maret 2002. Indonesia meratifikasi UNCLOS pada 1986 lalu Australia menyusulnya pada 1994. Timor Lorosa'e belum menanda-tangani atau meratifikasi UNCLOS ini, walaupun Kementerian Luar Negeri mulai mengkajinya dan akan menandatangani.

Disatukan, penyatuan: Lihat kesepakatan penyatuan internasional.

Upstream: Bagian dari proses pengembangan sumber minyak yang meliputi penemuan dan penyulingan bahan minyak mentah dari dalam tanah ke dalam pipa atau kapal untuk selanjutnya diproses secara lebih lanjut.

Woodside Australian Energy: adalah penghasil gas terbesar Australia (walaupun lebih kecil dari perusahaan-perusahaan minyak internasional lainnya) juga operator ladang-ladang Sunrise, Laminaria-Corallina, dan Kuda Tasi/Jahal. Saham Woodside sebesar 34% dimiliki oleh Shell, perusahaan minyak terbesar kedua di dunia.

Zona Kerjasama (ZOC): Didirikan dengan Kesepakatan Celah Timor antara Indonesia dan Australia pada tahun 1989 kemudian sekarang digunakan sebagai Area Eksplorasi Minyak Bersama antara Timor Lorosa'e dan Australia. ♦

CD-ROM tentang Minyak dan Gas

Kami menyediakan situs mengenai minyak dan gas di Laut Timor "Oilweb" dalam CD-ROM. Anda tidak perlu mencari informasi melalui internet tetapi anda bisa memperolehnya dari kantor kami di Farol, di belakang kantor Yayasan HAK. CD-ROM memuat dokumen-dokumen resmi dan hasil analisis tentang minyak dan gas di laut timor dalam bentuk tulisan, film dan drama.

Berita Singkat...

Pada tanggal 19-21 Mei 2003 diadakan sebuah konferensi internasional di Jakarta dengan tema *Iraq and the Global Peace Movement: What next?* yang diorganisir oleh Focus on the Global South. Konferensi tersebut dihadiri 60 aktivis perdamaian dan keadilan yang mewakili organisasi politik dan LSM yang berasal dari benua Asia, Eropa, Australia, Afrika dan Amerika. *La'o Hamutuk* mengirim 2 orang staff sebagai delegasi Timor Lorosa'e. Tujuan dari konferensi tersebut ialah untuk menguatkan jaringan perdamaian dan menentang perang juga lebih meningkatkan perdamaian dan keadilan di dunia terutama di Asia, Eropa dan Amerika Utara. Setelah 3 hari mengadakan diskusi dan debat intensif, para peserta akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama, yakni deklarasi dan statemen bersama yang mengutuk perang di Irak dan kekerasan di Aceh, Mindanao, Kashmir serta kampanye untuk keadilan di Timor Lorosa'e. Rencana aksi lainnya ialah akan terus mengkritisi globalisasi dan militerisasi yang telah menjadi alat penindasan dari negara maju terhadap negara berkembang.

Pada tanggal 6 Juni, sekitar 30 perwakilan organisasi lokal Timor Lorosa'e bertemu di Remexio di distrik Aileu untuk mengevaluasi aktifitas Dai Popular, (East Timorese Network for Popular Educators) selama dua hari. Di antara para partisipan adalah LSM-LSM lokal, organisasi masyarakat, serta kelompok perwakilan wanita dan petani dari hampir seluruh distrik di Timor Lorosa'e, yang bertemu untuk membahas pendidikan populer di Timor Lorosa'e dan merencanakan aktifitas Dai Popular untuk enam bulan mendatang. Rencana ini termasuk pertemuan bulanan di distrik-distrik untuk mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman di antara kelompok-kelompok yang bekerja dalam bidang pendidikan populer. Selain itu, akan ada pertukaran internasional mengenai MST (Landless Movement), suatu gerakan petani di Brasilia, yang sedang mengusahakan suatu reformasi dalam hal pertanian dan metode pertanian alternatif yang akan diadakan pada bulan September 2004. Suatu pertukaran pikiran bertaraf internasional dengan tokoh pendidikan populer dari negara-negara lain adalah bagian dari strategi Dai Popular untuk memperdalam dan membangun pengertian pendidikan populer dan memperbaiki hubungan antara organisasi-organisasi di Timor Lorosa'e dan negara lain yang memiliki pandangan yang sama. Pada bulan September tahun ini, Dai Popular dan *La'o Hamutuk* akan mengadakan suatu pertukaran pikiran bertaraf internasional, pada saat itu delapan anggota Dai Popular akan mengunjungi Kuba untuk berbagi pikiran dan pengalaman dengan organisasi-organisasi setempat yang menggunakan pendidikan populer dalam kerja mereka dalam bidang kesehatan, pertanian, dan ekonomi masyarakat. Pertemuan ini akan menjadi Pertemuan Nasional yang ketiga untuk Dai Popular. Pertemuan pertama diadakan pada Januari 2002 di Dare, dan yang kedua pada bulan September 2002 di Gleno.

Dai Popular pada awalnya dibentuk oleh 20 organisasi lokal dengan tujuan untuk membantu mengembangkan pendidikan populer di Timor Lorosa'e sebagai alat demokratisasi dan transformasi social. Sekarang, jaringan ini memiliki 36 anggota. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Dai Popular, lihat *La'o Hamutuk Bulletin* vol. 3, nomor 2-3.

Pada tanggal 4 Juli, lebih dari 50 orang Timor Lorosae dan beberapa simpatisan internasional mengadakan unjuk-rasa damai dengan menyalakan lilin di luar tempat tinggal resmi Duta Besar Amerika Serikat, pada waktu Dubes AS sedang mengadakan pesta untuk memperingati ulang tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke 227. Unjuk rasa damai ini diadakan oleh East Timor National Alliance for an international Tribunal, koalisi LSM-LSM termasuk Asia-Pacific Coalition for East Timor, Arte Moris, FOKUPERS, FORTILOS, GFFTL, GMPD, JSMP, Konsellu Solidaridade Estudante Timor Lorosae, KSI, *La'o Hamutuk*, LBH Ukun Rasik An, LIFSLIPO, NGO Forum Timor Lorosae, Oxfam Australia, Perkumpulan HAK, and Sa'he Institute for Liberation. Suatu pernyataan bersama diberikan kepada Dubes AS dan disebarkan kepada para tamu undangan, yang menekankan pokok-pokok berikut ini:

- bahwa tindakan pemerintah Amerika Serikat menyalahi prinsip-prinsip kemerdekaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang sedianya dijunjung tinggi oleh penduduk Amerika Serikat;
- bahwa walaupun Amerika Serikat telah memberi banyak bantuan dan dukungan untuk persiapan kemerdekaan dan proses pembangunan Timor Lorosa'e, selama 25 tahun Amerika Serikat mendukung penjajahan Indonesia atas Timor Lorosa'e dan memasok persenjataan dan latihan untuk tentara Indonesia;
- menekan Amerika Serikat untuk mendukung Pengadilan Kriminal Internasional untuk Timor Lorosa'e agar masyarakat Timor Lorosa'e mendapatkan keadilan untuk kejahatan kemanusiaan yang terpaksa dialami mereka pada masa penjajahan Indonesia dan selama proses referendum di tahun 1999;
- meminta Amerika Serikat untuk berhenti mendukung Tentara Nasional Indonesia, yang pada saat ini sedang melakukan kejahatan kemanusiaan di Aceh dan Irian Jaya, dan sebaliknya AS harus mengusahakan solusi yang baik untuk mengakhiri konflik di daerah-daerah tersebut;
- memprotes invasi dan pendudukan Amerika Serikat di Irak yang bertentangan dengan keinginan dunia internasional. Membebaskan Irak dari rezim yang membatasi kemerdekaan dan melanggar hak asasi manusia tidak dapat dilakukan dengan jalan yang juga membatasi kemerdekaan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pernyataan ini juga disebutkan agar Amerika Serikat menarik pasukannya dan menghormati hak penduduk Irak untuk mengatur negaranya sendiri. ❖

Kerjasama Brazil di Timor Leste

Pada tahun 2002 Timor Lorosa'e bergabung dengan Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP) yang terdiri dari Angola, Brazil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mozambique, Portugal dan São Tomé e Príncipe.

Portugal dan Brazil merupakan dua negara anggota CPLP yang memberikan bantuan keuangan atau memiliki proyek-proyek pembangunan di Timor Lorosa'e. Untuk memperoleh informasi mengenai bantuan Portugal lihat *Buletin La'o Hamutuk v. 3, n. 7*. Dalam Buletin ini *La'o Hamutuk* melanjutkan serangkaian artikel yang menganalisa hubungan antara Timor Lorosa'e dengan anggota-anggota CPLP lainnya.

Agen Kerjasama Brazil - ABC

Brazil bukanlah sebuah negara "donor". Kerjasama internasionalnya didasarkan pada kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang lainnya yang menurut pemerintah Brazil berarti, "pengalihan teknologi, pengetahuan teknis dan pengalaman praktis yang berasaskan pada semangat non komersial" dan "mendukung mobilisasi dan pengembangan kapasitas teknis lokal, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak luar."

Proyek-proyek dan kegiatan yang dikembangkan oleh kerjasama internasional Brazil pada dasarnya mencakup pemberian konsultasi, pelatihan di bidang sumber daya manusia, penelitian bersama dan proyek-proyek kajian dan sumbangan berupa perlengkapan dan peralatan. Sebagian besar kerjasama teknis internasional Brazil diupayakan dan dikoordinasikan oleh Agen Kerjasama Brazil (ABC), suatu departemen pada Kementerian Luar Negeri. Karena ABC bukanlah suatu agen pelaksana, badan ini menggalang kerjasama dengan organisasi-organisasi pemerintah dan non pemerintah dan yayasan pemerintah Brazil guna melaksanakan proyek-proyek yang berada di bawah keseluruhan koordinasinya.

Lagi pula, pemerintah Brazil mengelola proyek-proyek bantuan dan kegiatan internasional melalui badan-badan seperti Departemen Kerjasama Internasional, Departemen Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Departemen Kerjasama Budaya dan Kementerian Kesehatan. Namun demikian, artikel ini hanya akan mengkaji proyek-proyek

yang dikelola ABC di Timor Lorosa'e, yang dititikberatkan pada dua proyek penting: Pengaksanaan Masyarakat dan Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan Peningkatan Sosial.

ABC di Dunia

Proyek-proyek ABC bisa berupa proyek-proyek bilateral ataupun multilateral, melalui badan-badan internasional seperti badan-badan PBB. ABC juga memiliki proyek-proyek khusus yang berada dalam jangkauan forum internasional di mana Brazil sendiri merupakan anggota, seperti CPLP.

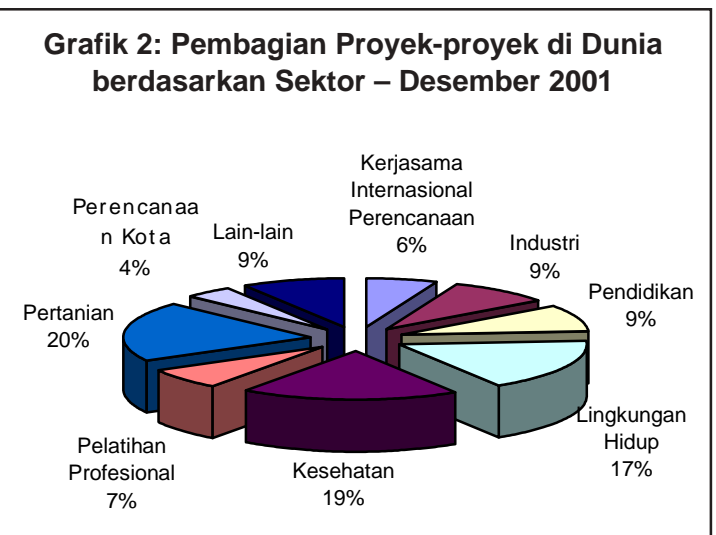
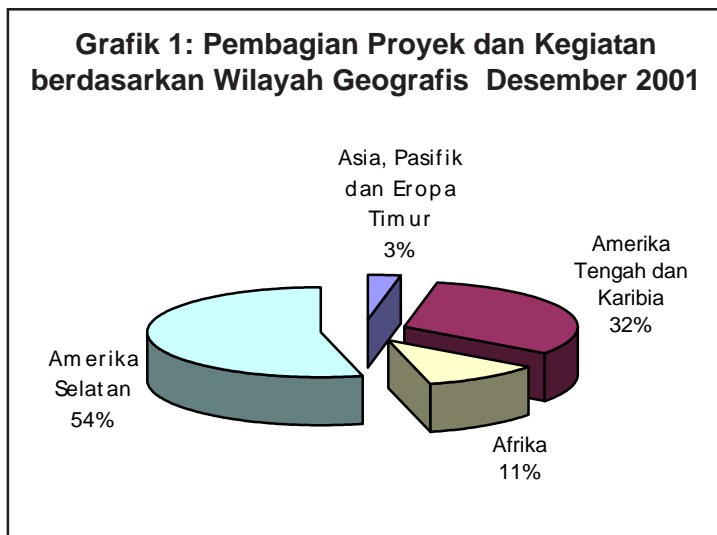
Pada tahun 2002 semua kerjasama teknis ABC dengan negara-negara berkembang lainnya ditujukan pada negara-negara berbahasa Portugis dan Amerika Latin serta Karibia (*lihat grafik 1*), dan pada umumnya dititikberatkan pada pertanian, kesehatan, lingkungan hidup dan pendidikan (*lihat grafik 2*). Sebesar 3% dari keseluruhan bantuan yang ditetapkan untuk Eropa Timur, Asia dan Pasifik adalah proyek-proyek yang dilaksanakan di Timor Lorosa'e.

La'o Hamutuk tidak memiliki akses terhadap sejumlah kerjasama resmi ABC, tetapi sumber-sumber dari pemerintah Brazil mengatakan kepada kami bahwa jumlah bantuan yang dialokasikan kepada Timor Lorosa'e dalam tahun 2002 jumlahnya mendekati 936.000 dolar AS atau sekitar 30% dari keseluruhan kerjasama ABC.

ABC di Timor Lorosa'e

Dalam tahun 1999 dan 2000, selama Pemerintahan transisi di bawah PBB (UNTAET), para pemimpin Timor Leste seperti Xanana Gusmão, yang pada saat itu menjabat Presiden CNRT dan Pastor Filomeno Jacob, Menteri Pendidikan dan sosial dalam Pemerintahan transisi mengunjungi Brazil dalam rangka meningkatkan kemungkinan kerjasama Brazil di Timor Lorosa'e, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. ABC menyajikan sejumlah proyek yang akhirnya disetujui para pemimpin Timor Lorosa'e dan UNTAET.

Kerjasama Brazil di bidang kesehatan dibatasi pada kegiatan-kegiatan jangka pendek seperti pelatihan para dokter Timor Lorosa'e di Brazil, pengiriman para dokter Brazil ke Timor Lorosa'e atau kampanye imunisasi. Tidak ada proyek-proyek jangka panjang yang telah dikembangkan.



Kebanyakan proyek-proyek kerjasama Brazil di sektor pendidikan dipusatkan pada bidang-bidang non-formal, khususnya dalam pengembangan dan pengenalan kembali bahasa Portugis. Sebagian besar dari proyek-proyek ini merupakan penyesuaian proyek-proyek yang dikembangkan di Brazil.

Proyek-proyek ABC di Timor Lorosa'e – 2002/2003

Sejak kerja sama ABC dengan Timor Lorosa'e yang dimulai tahun 2000, badan ini telah mengeluarkan 2.960.000 dolar AS. Jumlah ini juga mencakup gaji staff Brazil dan ongkos perjalanan udara ke dan dari Timor Lorosa'e.

Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan Promosi Sosial 1.800.000 dolar AS: Suatu proyek pelatihan Kejuruan bagi orang dewasa dan pemuda yang berumur lebih dari 15 tahun (*lihat di bawah*).

Proyek Pengaksaraan Masyarakat – 540.000 dolar AS: Suatu proyek pengaksaraan bahasa Portugis bagi kaum muda dan orang dewasa (*lihat artikel dalam Bulletin ini*).

Proyek Pendidikan Berjangka – 490.000 dolar AS: Proyek pendidikan berjangka disediakan untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah walaupun proyek ini dititikberatkan pada pelajar dengan usia 15 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Proyek ini mempergunakan metodologi “telesalas”: semua mata pelajaran diajarkan melalui video, dengan seorang guru yang memberikan penjelasan tambahan. Semua materi sama seperti materi-materi yang digunakan di Brazil. Proyek tersebut dimulai pada bulan Agustus 2001, dengan rencana untuk membuka 20 “telesalas” di Dili dan Baucau dengan jumlah siswa 500 orang. Dewasa ini terdapat 12 “telesalas” di Dili dan memiliki 283 siswa namun telesalas yang di Baucau tidak pernah dibuka sampai sekarang. Mata pelajaran untuk pelajar tingkat sekolah dasar meliputi bahasa Portugis, Matematika dan Ilmu Pengetahuan, dan bagi sekolah menengah selain dari tiga mata pelajaran di atas juga ada mata pelajaran tambahan seperti Biologi, Fisika dan Kimia. Bahan-bahan mengenai Sejarah Timor Lorosa'e dan Geografi masih belum dikembangkan sehingga pelajaran-pelajaran ini belum diajarkan. Tujuan dari proyek ini ialah mempersiapkan kaum muda yang tidak memiliki peluang bersekolah atau menyelesaikan pendidikan mereka selama pendudukan Indonesia untuk kembali pada sistem pendidikan formal. Tetapi proyek tersebut memiliki sejumlah permasalahan: bahan-bahan yang dipersiapkan tidak menjawab kebutuhan orang Timor Lorosa'e; tingkat putus sekolah di atas 40%; dan hanya 16% dari para pelajar lulus ujian pada berbagai bidang studi. Sejak awal 2003 proyek tersebut dialihkan ke Departemen Pendidikan Non-formal pada Kementerian Pendidikan, yang telah mengevaluasi proyek tersebut dan berupaya menyesuaikan dengan situasi Timor Lorosa'e.

Proyek Kopi – 130.000 dolar AS: Suatu proyek patungan dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan tujuan mengembangkan produksi kopi di Timor Lorosa'e, melatih para pegiat budidaya pertanian dan petani kopi dalam teknik-teknik penanaman kopi. Proyek ini dimulai pada 2002 dan dilaksanakan di kota-kota

penghasil kopi seperti Ermera, Liquiça, Aileu, dan Same. Seorang teknisi Brazil dan rekan kerjanya Timor Lorosa'e pada Kementerian Pertanian yang mengkoordinasi proyek tersebut.

Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan Promosi Sosial

Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan Promosi Sosial merupakan suatu proyek yang diminta langsung oleh Xanana Gusmão, Presiden CNRT saat itu, ketika mengunjungi Brazil pada tahun 2000. Presiden Xanana Gusmão mengunjungi Pelayanan Nasional bagi Pelatihan Industri (Senai), di São Paulo, dan meminta pemerintah Brazil menerapkan proyek serupa di Timor Leste. Dalam tahun yang sama sembilan putera Timor Lorosa'e diberangkatkan ke Brazil guna mengikuti pelatihan dua bulan di Senai dan memulai pembangunan Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan Promosi Sosial di Becora. Proyek tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi orang dewasa dan kaum muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah di bidang-bidang yang dianggap penting untuk Timor Lorosa'e.

Pusat tersebut dibuka pada 21 Mei 2001 dengan memiliki tujuh jurusan yang berbeda antara lain: pertukangan, pembuatan perabot rumah tangga, keterampilan menjahit, pembuatan batako, teknik elektronik, keterampilan komputer dan pematirian. Kursus membuat kue telah siap dimulai dengan segala peralatan yang diperlukan dengan seorang pembina terlatih Timor Lorosa'e. Tetapi sang koordinator Brazil masih menunggu kedatangan seorang pembina Brazil guna memulai kursus, walaupun sang pembina Brazil tidak akan mengajar dalam kursus tersebut. Proyek tersebut dimaksudkan meningkatkan cakupan pelatihan menjadi 12 kali, tetapi materi-materi yang hendak diajarkan masih belum ditentukan.

Pelajaran-pelajaran dalam semua bahan berlangsung antara empat jam lamanya dan dilaksanakan setiap hari pada pagi dan sore hari. Kursus-kursus tersebut berkisar antara 400 hingga 600 jam selama jangka waktu lima hingga enam bulan pelajaran. Sebagaimana segala mata pelajaran tersebut berkenaan dengan kejuruan segala kursus meliputi 75 persen praktek dengan 25 persen teori. Para peserta dinilai berdasarkan jam kehadiran mereka. Semua instruktur merupakan orang Timor Lorosa'e, dan mereka menggunakan bahasa Tetun atau Indonesia dalam pengajaran sehingga lebih mudah dimengerti oleh para peserta dibandingkan dengan bahasa Portugis. Para instruktur Brazil hanya memantau dan mendukung para pembina Timor Lorosa'e, tetapi tidak terlibat langsung dalam urusan para pelajar.

Usia minimum bagi peserta ialah 16 tahun. Kendatipun pusat tersebut dapat menangani 24 peserta tiap kursus kini masing-masing kursus rata-rata memiliki 10 orang peserta (*lihat tabel 2*). Tingkat putus sekolah mencapai sekitar 40%. Menurut koordinator teknik Timor Lorosa'e, hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya uang transport bagi para peserta atau perlu mendapatkan pekerjaan yang digaji karena mereka tidak menerima uang guna mengikuti kursus-kursus tersebut.

Tabel 2: Peserta per Bidang	
Bidang	Peserta (pagi + sore)
Pembuatan Perabot	10
Pertukangan	9
Keterampilan Manjahit	17
Keterampilan Komputer	11
Pematrian	13
Teknik elektronik	8
Pembuatan batako	8

Misi Portugis dan Sekretaris untuk Urusan Buruh dan Solidaritas memiliki proyek pelatihan kejuruan yang serupa di Tibar, di mana para peserta menerima 2.00 dolar AS per hari untuk mengikuti pelajaran. Menurut utusan ABC untuk Timor Lorosa'e, hal ini merupakan suatu kebijakan paternalistik sehingga ABC menolak melakukan hal serupa.

Walaupun proyek tersebut memprioritaskan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, namun proses seleksi melibatkan tes masuk yang sulit, yang mendiskriminasikan para peserta yang tidak memiliki suatu pendidikan formal.

Masalah lainnya ialah koordinasi orang Brazil. Sejak Desember 2002 tidak ada seorang pun pembina Brazil di Timor Leste, kendatipun jelas bahwa keseluruhan koordinasi proyek tersebut berada di tangan ABC. Selain itu karena para pembina Timor Leste ditinggalkan sendiri, komunikasi dengan Brazil menjadi bermasalah sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lamban.

Tahap pertama proyek ini telah berakhir pada tahun 2002, dan dalam tahapnya yang sekarang pemerintah Timor Leste bertanggungjawab atas gaji para staff Timor Leste. Kerjasama Brazil membayar para pembina Brazil (yang sudah tidak ada sejak Desember 2002) dan menyediakan dana untuk peralatan kursus. Pada saat koordinasi pusat tersebut secara penuh dialihkan kepada orang Timor Lorosa'e yang rencananya akan laksanakan pada 2004. Pemerintah Timor Lorosa'e akan mendapatkan semua peralatan dari pusat tersebut.

Proyek Pengaksaraan Masyarakat

Proyek Pengaksaraan Masyarakat merupakan suatu "penyesuaian" program yang diterapkan di Brazil sejak tahun 1997 yang disebut "Pengaksaraan Solidaritas", suatu program yang dirancang khusus untuk mengajarkan orang dewasa dan kaum muda yang berusia diatas 15 tahun agar bisa membaca dan menulis. Program ini diciptakan untuk menurunkan tingkat buta aksara dan memperluas tersedianya pendidikan umum kepada kaum muda dan orang dewasa.

Timor Lorosa'e, Mozambique, São Tomé e Príncipe, Guatemala dan Cabo Verde merupakan negara-negara yang pertama kali menerapkan proyek Kerjasama Brazil ini. Di negara-negara tersebut proyek ini dilaksanakan oleh Alfabetização Solidária, Organisasi Non Pemerintah yang mengembangkan metodologinya dan mengkoordinir program tersebut di Brazil melalui kerja sama dengan sejumlah universitas Brazil dan pemerintah lokal di bawah koordinasi ABC.

Suatu tahap proyek percontohan Pengaksaraan Komunitas telah dimulai di Dili pada bulan Oktober 2000. Sekitar 20 orang guru, koordinator dan pembina Timor Lorosa'e dilatih di Brazil. Proyek ini membuka 11 ruang kelas di Dili dengan siswa 275 orang. Metodologi dan bahannya sama seperti yang digunakan di Brazil dan proyek tersebut dimaksudkan untuk mengajarkan para peserta cara membaca dan menulis dalam bahasa Portugis sebagai bagian dari upaya kerjasama Brazil untuk mempromosikan bahasa Portugis di Timor Lorosa'e.

Percontohan tahap pertama dari proyek ini berakhir pada bulan Desember 2001, kemudian pada bulan Januari 2002 percontohan tahap kedua memperluas proyeknya ke wilayah yang lain di negara ini. Sekolah Pengaksaraan Masyarakat dibuka di semua kabupaten, masing-masing sekolah mempunyai 10 orang guru, seorang koordinator dan seorang pembina pedagogi dengan demikian jumlah keseluruhan staf adalah 156 orang. Mereka ini didik oleh guru-guru Brazil di Dili.

Proyek tahap kedua berakhir pada bulan Desember 2002, dan tahap ketiga sebagai tahap terakhir dari proyek tersebut dialihkan kepada pemerintah Timor Lorosa'e kemudian pemerintah bertanggungjawab atas administrasi dan keuangan termasuk pembayaran gaji staff. Pemerintah juga telah mengadaptasi proyek tersebut dan dalam enam bulan pertama sekolah-sekolah dari proyek tersebut dibaktikan untuk pengajaran bagaimana membaca dan menulis bahasa Tetun, sebelum mengajarkan bahasa Portugis. Proyek "baru" yang dinamakan "Membaca dan Pengaksaraan Nasional" tersebut telah dimulai dan Kementerian Pendidikan berencana untuk membuka 205 sekolah yang akan menampung sekitar 6.000 pelajar di 13 distrik.

Dalam tahap terakhir ini peran kerjasama Brazil masih dirundingkan namun tampaknya akan dikonsentrasikan pada dukungan terhadap pelatihan bagi tim dari Kementerian Pendidikan dalam rangka mengembangkan materi pengajaran dan pencanganan kurikulum bagi pendidikan non-formal bersama dengan Kementerian Pendidikan.

Masalah-masalah dan Hasil

Berdasarkan suatu dokumen yang ada dalam situs/webside Alfabetização Solidária, "di negara-negara ini program tersebut menyertakan seleksi dan pelatihan kepada para guru, evaluasi hasil, demikian juga halnya dengan implementasi struktur yang memungkinkan kelanjutan proses serupa di bidang pendidikan orang dewasa dan kaum muda. [...] Tujuannya ialah untuk menyesuaikan proyek tersebut dengan ciri dan kebutuhan khusus dari setiap negara dan menjamin keberlanjutan dirinya." Tetapi hal ini tidak selalu berhasil dan tujuan-tujuan tersebut dalam prakteknya tidak tercapai.

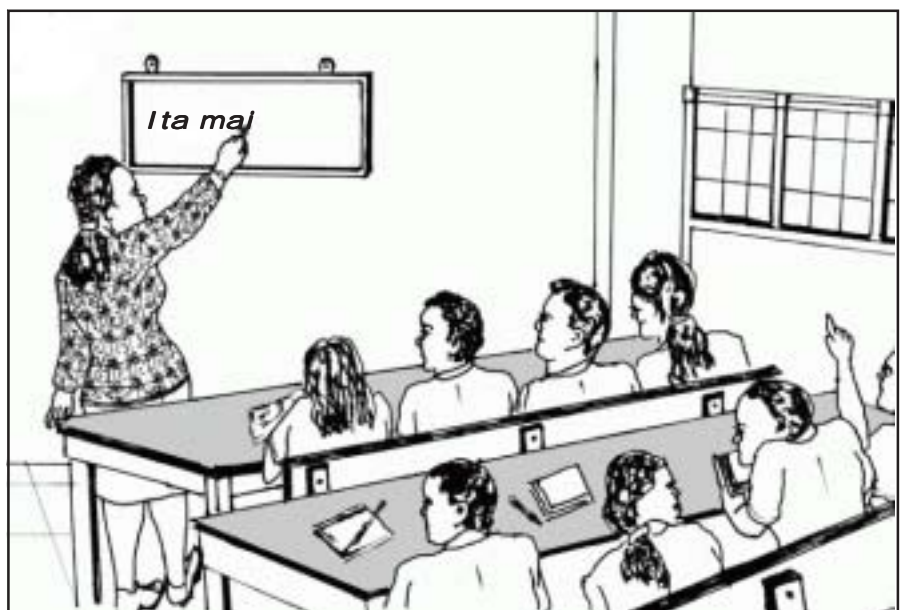
Dalam kasus Timor Lorosa'e persoalan utama yang dihadapinya adalah bahasa. Metodologi yang digunakan di Timor Leste sama seperti yang dipersiapkan bagi para pelajar Brazil yang menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa pertama mereka. Sebagian besar masyarakat Timor Lorosa'e tidak bisa berbicara Portugis dan hal ini akan menyebabkan kesulitan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan pengaksaraan dalam bahasa yang dianggap baru. *La'o Hamutuk* juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan

informasi akurat mengenai hasil pelaksanaan proyek tersebut. Staff Kementerian Pendidikan menyampaikan informasi sangat penting yang berbeda dengan yang diberikan oleh koordinator Brazil, Prof. Antônia Pincano, yang diwawancarai dalam suatu kunjungan sepuluh hari di Timor Lorosa'e pada Maret 2003. Menurut seorang pejabat tinggi Timor Lorosa'e yang bekerja pada Departemen Pendidikan Non-formal, tingkat putus sekolah pada tingkat pertama proyek tersebut mencapai sekitar 40%, sebagian besar disebabkan oleh kesulitan yang ditemui para pelajar yang



mengikuti pelajaran bahasa Portugis. Sementara Prof. Pincano menyatakan tingkat putus sekolah mencapai 19% yang disebabkan oleh sakit dan kurangnya transportasi serta guru. Tetapi selama wawancara ia mengakui bahwa pelajaran tersebut diawali dengan sekitar 25 siswa, kemudian berakhir dengan sekitar 16 siswa sehingga karena itu tingkat putus sekolah mencapai 36%.

La'o Hamutuk menemui persoalan serupa dengan mendapatkan informasi tentang fase kedua dari proyek tersebut. Saat artikel ini ditulis evaluasi terhadap para peserta belum rampung. Prof. Pincano melaporkan bahwa 141 kelas pengaksaraan dibuka, dengan masing-masing kelas menampung 25 peserta, dan dari jumlah tersebut 24 kelas ditutup pada tahun itu juga karena kurangnya tenaga pengajar. Kementerian Pendidikan RDTL melaporkan bahwa 156 ruang kelas dibuka tetapi kemudian 31 dari jumlah tersebut ditutup karena tingginya tingkat putus sekolah. Seorang pegawai pada Kementerian tersebut juga mengatakan 20 kelas dibuka di Dili, hanya 7 ruang yang masih dibuka hingga proyek tahap tersebut berakhir. Banyak peserta Timor Lorosa'e yang melaporkan bahwa diajarkannya dalam bahasa Portugis merupakan suatu masalah. Kementerian Pendidikan berupaya meningkatkan motivasi para siswa dan menurunkan tingkat putus sekolah pada tahap ketiga proyek tersebut dengan mempergunakan bahasa Tetun selama enam bulan pertama.



Selama proyek tahap kedua berlangsung di bawah koordinasi Brazil, pihak berwenang Timor Lorosa'e tidak memiliki kemandirian untuk melakukan perubahan tertentu di bidang metodologi. Menurut Prof. Pincano "penjelasan dapat dilakukan dalam bahasa Tetun, tetapi semua kegiatan harus dalam bahasa Portugis".

Proyek tersebut dikelola dari Brazil. Para pimpinan proyek di Timor Lorosa'e yang ditempatkan di setiap distrik hanya melaksanakan proyek itu tetapi tidak mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dua orang guru dari tim Brazil didatangkan ke Timor Lorosa'e setiap dua bulan untuk waktu sepuluh hari. Mereka mengunjungi tempat-tempat proyek guna mengecek kelangsungan pelaksanaan proyek kemudian mengambil keputusan. Masing-masing kelompok bertanggungjawab atas tiga distrik dan melakukan kunjungan selang-seling. Ini berarti setiap distrik akan dikunjungi sekali setiap enam bulan selama tidak lebih dari empat hari. Kunjungan ini sebenarnya sangat singkat sehingga tidak cukup waktu untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek tersebut di setiap distrik. Orang Timor Lorosa'e yang terlibat dalam pelaksanaan proyek itu menyadari bahwa manajemen Brazil sangat berbeda dan tidak sesuai dengan kondisi di Timor Lorosa'e. David Letichevsky, utusan ABC untuk Timor Lorosa'e,

mengaku bahwa waktu sepuluh hari tidak cukup untuk mengkoordinasikan suatu proyek sebesar ini, tetapi ABC tidak dapat mempertahankan tim Brazil tersebut di sini untuk waktu yang lama. Prof. Pincano mengatakan bahwa para pengajar Brazil yang bergabung dalam tim yang mengunjungi Timor Lorosa'e tetap melakukan pekerjaan mereka di Brazil sehingga tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka untuk waktu yang sangat lama. Jelas bahwa akan lebih efektif menempatkan seseorang yang tinggal permanen di Timor Lorosa'e guna mengkoordinir proyek tersebut bersama dengan rekannya dari Timor Lorosa'e.

Ada juga persoalan menyangkut persiapan proyek yang ditawarkan kepada para peserta yang menyelesaikan kelas

mereka. Di Brazil sendiri program Pengaksaraan Solidaritas mendapatkan kritikan dari sejumlah pakar dan kelompok yang bekerja pada pendidikan orang dewasa dan kaum muda mengatakan bahwa waktu pengajaran (lima bulan di Brazil) sangat singkat dan karena itu program tersebut lebih mementingkan jumlah tamatan dari pada mutu pendidikan itu sendiri. *La' o Hamutuk* juga memperoleh informasi bahwa di Timor Lorosa'e ada kritikan yang sama terhadap proyek tersebut: satu tahun itu tidak cukup bagi para siswa yang buta huruf untuk segera membaca dan menulis dalam suatu bahasa yang baru lalu melanjutkan pendidikan mereka dalam program pendidikan lain yang dirancang untuk orang dewasa dan kaum muda.

Prof. Pincano mengatakan bahwa program tersebut bukan merupakan suatu program pengaksaraan yang ortodoks tetapi difokuskan pada membaca dan percakapan. Menurutnya, para pelajar yang merampungkan tahun pertama dan yang belum siap untuk melanjutkan pendidikan mereka dapat mengulang karena "para guru dilatih untuk mengajar para siswa yang benar-benar buta huruf maupun yang sedikit bisa mengenal huruf". Ia mengatakan perkembangan pendidikan orang dewasa dan kaum muda masih sedang dikaji bersama dengan Kementerian Pendidikan tetapi ia mengakui rencana di masa depan harus memiliki dua tingkat kelas pemberantasan buta huruf yang masing-masing kelas akan berakhir dalam waktu satu tahun.

Kesimpulan

La' o Hamutuk menyadari bahwa Brazil bukan merupakan suatu negara yang kaya tetapi kami menyambut baik upaya-upayanya untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan dan rekonstruksi Timor Lorosa'e.

Namun demikian, kami yakin bahwa upaya-upaya tersebut sebaiknya digunakan secara lebih efektif dengan menghormati keinginan dan kebutuhan masyarakat Timor Lorosa'e. Jelas bahwa Timor Lorosa'e yang secara de facto memilih bahasa Portugis dengan Tetum sebagai bahasa resminya memiliki dampak yang besar dalam kerjasama Brazil ini. Tetapi pemerintah Brazil sebaiknya menyadari bahwa data dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa masyarakat Timor Lorosa'e yang bisa berbicara bahasa Portugis kurang dari 5% karena bahasa ini bukan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Rendahnya kualitas atau jeleknya hasil yang diraih dari proyek Pengaksaraan Masyarakat dan Pelatihan Guru dan Pelajar dengan Fasilitas Pendidikan Jarak Jauh menunjukkan bahwa ketidak efektifan pelaksanaan proyek-proyek yang didesain untuk pengajaran dalam konteks Brazil di Timor Lorosa'e,

tanpa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan Timor Lorosa'e dan menyesuaikannya dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tentu saja ada manfaat untuk mempertimbangkan pengalaman lain akan tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana mengembangkan pengalaman orang Timor Lorosa'e itu sendiri. Dan peran serta yang efektif dari orang Timor Lorosa'e dalam proses ini akan menjadi lebih esensial.

Demi pencapaian hasil yang lebih baik dari proyek-proyek Brazil di masa mendatang, beberapa perubahan strategis harus dilakukan:

- Masyarakat Timor Leste seperti NGO-NGO lokal dan organisasi-organisasi masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam proses perancangan proyek tersebut;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat Timor Lorosa'e yang efektif dalam pelaksanaan dan penyesuaian proyek, tidak hanya sebagai pelaksana tetapi memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan mempengaruhi keputusan;
- Dalam proyek-proyek pendidikan gunakanlah bahan-bahan yang dirancang oleh guru-guru Timor Lorosa'e yang tahu dan mengerti akan kenyataan dan budaya negara mereka. Proyek-proyek itu juga harus mendukung pengembangan bahan-bahan dalam bahasa Tetum.
- Koordinator dan karyawan Brazil yang bekerja di negeri ini harus berkomitmen untuk memahami dan menghormati serta berkerja sama dengan masyarakat Timor Lorosa'e pada tingkat yang sama dengan rekan mereka dari Timor Lorosa'e;
- Sebagai koordinator yang bekerja dan tinggal di Timor Lorosa'e harus bekerja sama dengan orang Timor Lorosa'e agar bisa memahami persoalan yang muncul dari setiap proyek dan bagaimana menyelesaikannya.
- Portugis bukanlah satu-satunya bahasa resmi di Timor Lorosa'e dan bahasa itu hanya dipahami jumlah kecil penduduk. Konstitusi yang mencantumkan Tetum dan Portugis sebagai bahasa resmi juga menyatakan bahwa "Tetum dan bahasa-bahasa nasional lainnya patut dihargai dan dikembangkan oleh Negara". Ketika proyek ini dikembangkan untuk mempromosikan kembali bahasa Portugis di Timor Lorosa'e, pemerintah Brazil harus sadar dan menghormati realitas ini. Keberatan para staff Brazil untuk berkomunikasi dengan rekan kerja Timor Lorosa'e dalam bahasa Tetum dan usaha-usaha pemerintah Brazil untuk tidak mengembangkan bahasa Tetum di dalam proyek-proyek pendidikannya menunjukkan sikap tidak menghormati hak-hak dan keinginan masyarakat Timor Leste. ❖

Dengar Program Radio La' o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi dan isu-isu lainnya dalam bahasa Tetum dan Indonesia:

Setiap Jumad pukul 3.00 sore di Radio Rakambia.

Setiap hari Sabtu pukul 11.00 pagi di Radio Timor Leste dan Radio Timor Kmanek.

Laporan Konferensi Mitra Pembangunan

Negara-negara penyumbang dana untuk pembangunan Timor Lorosa'e melakukan pertemuan yang kelima kalinya pada tanggal 4-5 Juni 2003. Pertemuan ini diorganisir oleh Pemerintah Timor Lorosa'e dan Bank Dunia, termasuk utusan dari Amerika Serikat, Australia, Canada, Jepang, Inggris, Zelandia Baru, Norwegia, Finlandia, Irlandia, Uni Eropa, Portugal, Jerman, Perancis, Cina, Malaysia dan Korea Selatan. Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Jamil Kasum wakil presiden Bank Dunia untuk wilayah Asia Pasifik menjadi pemimpin pertemuan tersebut.

Selain negara-negara penyumbang dana dan pemerintah Timor-Leste, konferensi ini juga dihadiri oleh badan-badan PBB di Timor-Leste seperti UNMISSET, UNDP, UNESCO, UNICEF dan FAO. Sedangkan dari kelompok masyarakat sipil terdiri dari Cicilio Caminho Freitas, dari NGO Forum Timor Lorosa'e, Tomas Freitas dari La'o Hamutuk, Joao Mariano Saldanha dari East Timor Study Group, Nelson Belo dari Judicial System Monitoring Program dan Jamieson Davies dari Catholic Relief Service mewakili NGO internasional di Timor Lorosa'e.

Konferensi ini diselenggarakan untuk melihat kembali anggaran pembangunan nasional Timor Lorosa'e yang direncanakan oleh pemerintah dan strategi pembangunan nasional serta pengembangan Program Dukungan Transisi (TSP). Dana yang disalurkan dalam Program Dukungan Transisi ini sistemnya berbeda dengan TFET yang sebelumnya dikelola oleh Bank Dunia dan ADB. TSP sistem kerjanya seperti saluran pipa (pipe line) artinya tidak dikelola oleh Bank Dunia tetapi Bank Dunia hanya sebagai fasilitator dan juga pengawas untuk dana yang akan dikirimkan oleh para Mitra Pembangunan, dan selanjutnya pemerintah dengan segera menggunakan dana tersebut. (*Lihat La'o Hamutuk Bulletin Vol. 4, No. 2.*)

Program Pemerintah Timor Lorosa'e

Pemerintah Timor Lorosa'e diwakili oleh Presiden RDTL Xanana Gusmao, Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Menteri

Kutipan: Dari Pidato Pembukaan oleh Xanana

Saya menginformasikan bahwa Pemerintah Timor Lorosa'e telah membuat perencanaan pembangunan nasional yang baik. Tetapi hal itu belum cukup. Kita perlu menunjukkan kemajuan-kemajuan yang substansial dalam pengimplementasian melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang didapat oleh masyarakat, seberapa banyak peluang yang didapat oleh petani untuk menjual hasil produksi sesuai harga standar pertanian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Barometer suatu kemajuan tidak dilihat dari berapa banyak uang yang diberikan oleh mitra pembangunan kepada budget Pemerintah, namun harus dilihat dari seberapa banyak pemuda dan veteran yang memiliki pekerjaan, seberapa banyak masyarakat kita berproduksi serta mempunyai akses untuk menjualnya, apakah ada "persediaan makanan selama masa paceklik", apakah anak-anak kita semua bersekolah dan apakah semua masyarakat kita menerima kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Kita perlu mengerakkan dan melibatkan masyarakat kita "sebagai agen-agen perubahan" dalam melakukan transformasi pada kehidupannya dan pembangunan masa depan ke arah yang lebih baik bagi mereka sendiri, anak-anak mereka dan juga bangsa, daripada menjadi korban "sedekah" dari Pemerintah dan agen-agen pendonor.

Keuangan dan Perencanaan Madalena Boavida menjelaskan kepada para Mitra Pembangunan tentang prioritas pembangunan nasional dan anggaran pembangunan nasional.

Pada sisi lain, Perdana Menteri Mari Alkatiri menjelaskan tentang upaya-upaya pemerintah dalam memprioritaskan program-program yang termuat dalam rencana pembangunan nasional. Menurut Alkatiri, saat ini pemerintahnya sedang memfokuskan diri pada pengembangan ekonomi dan lapangan kerja guna menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran, stabilitas keamanan, pengembangan kapasitas institusi, pengembangan hubungan interaktif antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah yang baik, pengembangan manajemen kekayaan minyak dan mengupayakan satu forum nasional antara pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat sipil; NGO, sektor swasta dan koperasi, gereja dan lain sebagainya untuk membahas isu-isu nasional.

Perspektif dari kelompok masyarakat sipil

Pada sesi yang lain, kelompok masyarakat sipil juga memberikan pandangan tentang program perencanaan pembangunan nasional dan penetapan anggaran belanja negara yang diajukan oleh pemerintah Timor Lorosa'e. Wakil kelompok masyarakat sipil dalam pandangannya mengangkat beberapa persoalan nasional seperti persoalan Celah Timor, keadilan dan kebijakan asing. Satu pernyataan dari NGO Forum yang mewakili beberapa NGO lokal dan Internasional. Dalam pernyataan yang terpisah sembilan NGO yang mendukung *Ukun Rasik An* (dalam istilah Tetun mengadung arti kedaulatan, penentuan nasib sendiri, pemenuhan kebutuhan

Kutipan: Pernyataan dari NGO-NGO yang mendukung Ukun Rasik An

Walaupun kekejaman-kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Timor Lorosa'e tidak bisa dihapuskan atau dilupakan, mereka yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan itu harus memenuhi tanggungjawabnya dengan melakukan perubahan. Ini bukanlah suatu bentuk amal-kebaikan, tetapi suatu awal yang baik untuk pemulihan....

Proses kemerdekaan Timor Lorosa'e tidak akan lengkap sebelum dicapainya kesepakatan antara Australia dan Timor Lorosa'e tentang perbatasan laut di Laut Timor. Kami meminta Anda sekalian untuk mendorong Australia untuk bergabung dengan komunitas bangsa-bangsa yang patuh pada hukum dengan menerima tawaran Timor Lorosa'e untuk merundingkan perbatasan laut, dan jika perundingan gagal, dengan berpartisipasi dalam proses hukum yang diakui internasional untuk menyelesaikan perselisihan tentang perbatasan.....

Mayoritas penduduk Timor Lorosa'e menjadi korban kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di negeri ini sejak 1975 sampai 1999. Kami berharap para Mitra Pembangunan mendengarkan tuntutan kami bahwa para perancang dan pelaku kejahatan-kejahatan ini diajukan ke pengadilan. Kami meminta para Mitra Pembangunan Timor Lorosa'e dan masyarakat internasional umumnya untuk menuntut agar Indonesia bekerjasama dengan proses keadilan dengan cara yang berarti.... Kami juga yakin bahwa sekarang tiba saatnya bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai pembentukan suatu pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan di Timor Lorosa'e

Para Mitra Pembangunan tidak boleh menekan pemerintah untuk menswastakan pelayanan sosial dasar, tetapi harus memberikan ruang, waktu, dan dukungan untuk memungkinkan rakyat dan pemerintah Timor Lorosa'e untuk mengevaluasi dengan lengkap usulan-usulan tersebut. Para Mitra Pembangunan harus memberikan dana yang cukup agar golongan miskin tidak kehilangan hak atas pelayanan dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan karena ketidakmampuan mereka untuk membayar.



sendiri dan kemerdekaan), termasuk *La'o Hamutuk*, memberikan rekomendasi-rekomendasi tambahan.

Perspektif dan komitmen negara Mitra Pembangunan

Dalam konferensi ini ada beberapa negara donor dan badan PBB memberikan pandangan dan komitmen mereka mengenai rencana pembangunan nasional dan anggaran pembelanjaan nasional.

Dalam pernyataannya, mereka memuji bahwa pemerintah Timor-Lorosa'e telah membuat beberapa langkah positif dalam mengembangkan dan melaksanakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut mereka, langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah Timor-Lorosa'e diantaranya adalah program "pemerintahan terbuka/open government" yang dilakukan di kabupaten-kabupaten, penanganan kasus kerusuhan 4 Desember 2002, penandatanganan dan ratifikasi Pakta kerja sama laut Timor, pembentukan komisi veteran dan eks gerilyawan/kombatentes, normalisasi hubungan kerja diplomatik dengan Indonesia.

Selain pujian terhadap langkah-langkah positif pemerintah di atas, para Mitra Pembangunan juga menyampaikan beberapa persoalan yang menjadi pusat perhatian mereka:

- ✓ Sistem peradilan, di mana menurut mereka belum berjalan secara efektif dan transparan.

- ✓ Persoalan strategi pengembangan PNTL yang harus jelas, misalnya perekrutan yang transparan, dan mempromosikan hak asasi manusia.
- ✓ Desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, pelayanan dan dukungan pemerintah, desentralisasi pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan pemerintahan lokal.
- ✓ Persoalan bahasa di mana para pengambil keputusan belum menetapkan langkah-langkah untuk mengembangkan bahasa Tetum dan mengajarnya di sekolah-sekolah dasar.
- ✓ KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
- ✓ Kekurangan gizi yang dialami oleh anak-anak miskin.
- ✓ Listrik.

Para mitra pembangunan akan mengalokasikan dana untuk tahun anggaran 2003-2004 sebesar US\$27 juta. Dari jumlah ini, dana yang telah dikonfirmasi berjumlah US\$ 5.2 juta dan sisanya sebesar US\$ 21.8 juta belum dikonfirmasi. Sementara itu, dana untuk tahun anggaran 2004-2005, para mitra akan memberikan US\$ 25.9 juta. (Untuk gambaran selengkapnya tentang kontribusi donor kepada Timor Lorosa'e selama tahun fiskal yang lalu, mirip dengan tahun fiskal yang akan datang, lihat *La'o Hamutuk Vol. 4 No. 2*. ❖

Siapa itu La'o Hamutuk?

Staf La'o Hamutuk: Cassia Bechara, Simon Foster, Tomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Inês Martins, Adriano do Nascimento, Charles Scheiner, João Sarmiento, Jesuina (Delly) Soares Cabral

Gambar: Cipriano Daus

Penerjemah: Kylie

Dewan Penasehat: Maria "Micato" Domingas Alves, Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno "Cailoro" Rodrigues, Aderito de Jesus Soares

Editorial: Apa yang di Lakukan oleh UNMISSET Sekarang ?

La'o Hamutuk menyerahkan surat ini kepada Presiden Majelis Umum PBB Jan Kavan, pada saat dia mengunjungi Timor Lorosa'e selama minggu terakhir bulan Juli.

La'o Hamutuk

Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e

25 Juli 2003

Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia Kofi Annan
Presiden Sidang Umum PBB, Yang Mulia Jan Kavan
Utusan Khusus Sekjen PBB untuk UNMISSET Yang Mulia Kamalesh Sharma
Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB
Duta-duta besar yang berkepentingan di Timor Lorosa'e

Tuan tuan yang terhormat:

Dalam kurun waktu kurang dari setahun, Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Lorosa'e (UNMISSET) akan berakhir. Misi ini, misi ketiga di sini sejak 1999, telah mencapai banyak hal tetapi juga telah meninggalkan banyak hal yang harus dirampungkan.

Sebagaimana tuan tuan mendiskusikan saat-saat akhir UNMISSET, dan bentuk dukungan PBB bagi Timor Lorosa'e tentang apa yang akan terjadi pasca Juni 2004, ada banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Kami menulis guna menawarkan pandangan dari masyarakat sipil Timor Lorosa'e. La'o Hamutuk telah memantau dan berinteraksi dengan UNAMET, UNTAET dan UNMISSET selama empat tahun terakhir, dan kami berharap usul saran kami ini berguna.

Banyak hal yang telah ditulis mengenai "pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari" dari UNAMET dan UNTAET, dan kami tidak ingin mengulang kembali kesimpulan-kesimpulan tersebut. Tetapi, kami hendak menggarisbawahi kesulitan mendasar dalam melakukan pemerintahan atau nasehat dari jauh, menggunakan para personel dan lembaga yang tidak bertanggungjawab pada orang-orang yang hendak mereka perintah. Kami yakin bahwa konsep suatu Pemerintahan Peralihan PBB itu problematis, dan bahwa UNTAET nyaris tidak mengatasi tantangan-tantangan yang datang dari menggunakan para personel, "sukarelawan," dan konsultan yang dapat dipertanyakan di depan struktur dan regulasi yang dirancang dan dikelola oleh suatu lembaga yang berada di bagian lain dari dunia ini. Mandat UNTAET hampir seluruhnya berakhir saat badan ini menyadari bahwa "peralihan" lebih penting dari "pemerintahan" dalam namanya, sehingga tujuan utamanya ialah memberikan kapasitas dan struktur yang dapat memampukan negara Timor Lorosa'e yang baru merdeka dalam memerintah dirinya sendiri.

Bagi UNMISSET, dengan "dukungan" sebagai nama tengahnya, maksud itu ternyata lebih jelas dan lebih demokratis. Akan tetapi, kami yakin bahwa ada kesalahan-kesalahan serius mengenai kinerja UNMISSET dalam 14 bulan pertama, dan kami menawarkan sejumlah saran seperti cara menyiasati sisa waktu yang ada secara lebih efektif.

Kami percaya bahwa masyarakat internasional memiliki suatu kewajiban berlanjut guna memberikan dukungan bagi Timor Lorosa'e. Selama seper-empat abad, kemunafikan internasional dan kelalaian yang disengaja telah mengizinkan Indonesia melakukan pendudukan ilegal dan brutal. Bahkan di 1999, saat PBB akhirnya memutuskan menempuh tindakan-tindakan efektif, masyarakat internasional malah tergiur pada rekaan teror dan penghancuran sebelum dan pasca referendum yang dilakukan demi kedaulatan Indonesia oleh pasukan militer Indonesia. Timor Lorosa'e masih mengalami penderitaan dari warisan kekerasan terhadap kemanusiaan selama 24 tahun, yang di dalamnya masyarakat internasional secara besar-besaran telah gagal meminta pertanggungjawaban dari para pelaku.

Dalam suatu tatanan internasional yang adil, kekuatan-kekuatan yang mendukung pendudukan Indonesia dan gagal menghentikan penghancuran 1999 dapat melakukan ganti rugi kepada masyarakat Timor Lorosa'e. Tetapi dalam tatanan dunia sekarang, masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki kewajiban untuk merampungkan tugas-tugas yang telah diemban. Selanjutnya, dunia berutang budi pada kejujuran dan pertimbangan masyarakat Timor Lorosa'e, yang telah diabaikan selama bertahun-tahun, dan yang menjadi subjek untuk meretas proyek-proyek pemerintahan peralihan dan rekonstruksi pasca-konflik, pembangunan dan keadilan. Tatkala berbagai pengalaman di atas mengalami kegagalan, tanggungjawab masih berada di pundak masyarakat internasional guna membetulkannya.

Sesuai Resolusi Dewan Keamanan 1410, "UNMISSET akan, selama jangka waktu dua tahun, secara penuh secepat mungkin mengalihkan semua tanggungjawab operasional kepada pihak berwenang Timor Lorosa'e, tanpa membahayakan stabilitas." Periode dua tahun tersebut lebih dari separuhnya telah berakhir, dan sekarang merupakan saat yang tepat untuk melihat apa saja yang menjadi tanggungjawab internasional sekarang, serta setelah Mei 2004.

Kami tetap prihatin bahwa kebanyakan kegiatan Misi tidak cukup menjawab periode pasca-UNMISSET, saat Timor Lorosa'e akan bertanggungjawab mengemban fungsi-fungsi yang kini dikerjakan oleh staff dan para penasihat internasional. Salah satu peningkatan meliputi penyediaan pelatihan, materi pelatihan, dan informasi lainnya di bidang bahasa yang dipahami sebagian besar rakyat dalam negara ini: Tetun dan Bahasa Indonesia, serta merekrut personel internasional yang dapat berkomunikasi dalam bahasa-bahasa tersebut.

Untuk setiap tugas yang telah dilakukan UNMISSET, terdapat sejumlah kemungkinan

1. Tugas tersebut telah dilakukan dengan baik, dan akan diselesaikan menjelang akhir mandat.
2. Ada banyak masalah berkenaan dengan kinerja kerja atau merampungkannya sebelum berakhirnya mandat tersebut. Hal-hal ini dapat dijawab dengan meningkatkan atau memodifikasi kinerja kerja UNMISSET.
3. Tugas tersebut, dengan atau tanpa peningkatan-peningkatan, tidak akan diselesaikan pada akhir mandat. PBB seyogianya menemukan suatu cara guna memastikan bahwa hal itu dapat diselesaikan pada akhir misi.
4. Ada juga berbagai masalah dengan tugas, tetapi UNMISSET tidak cukup menjawab masalah-masalah tersebut. Dalam kasus-kasus tersebut, tidak perlu melanggengkan bagian Misi tersebut, sehingga harus berakhir sebelum atau sebagaimana yang direncanakan.

Keamanan Militer (eksternal): Pasukan Penjaga Perdamaian dan Para Pengamat Militer

Mandat UNMISSET ialah untuk “Memberikan sumbangsih pada ditegakkannya keamanan eksternal dan internal Timor Lorosa’e.” Walaupun PKF telah menjaga perbatasan Timor Lorosa’e sejak akhir 1999, banyak orang Timor Lorosa’e prihatin bahwa pasukan pertahanan Timor Lorosa’e Falintil-FDTL masih belum cukup dilatih untuk mengemban tanggungjawab ini selepas henggangnya PKF. Kami menyadari bahwa memberi pelatihan kepada militer Timor Lorosa’e bukanlah peranan PKF, tetapi kami menyarankan agar F-FDTL diperkenankan bekerja secara lebih dekat dengan PKF, belajar dari pasukan internasional dan bagian-bagian militer yang memiliki pelatihan dan pengalaman berbeda. Dalam akhir tahun UNMISSET, operasi gabungan dan pembagian informasi dengan F-FDTL, seiring dengan pengalihan tanggungjawab secara bertahap, akan memberikan keamanan yang lebih besar di masa mendatang.

Setelah Mei mendatang, Timor Lorosa’e hendaknya tidak menuntut lagi pertahanan dari pasukan internasional, kendatipun tentara PBB dapat bertindak sebagai penasehat dan pelatih. Tanggungjawab komando dan kendali operasional sepenuhnya harus berada di tangan pemerintah Timor Lorosa’e.

Keamanan Internal: Polisi PBB (UNPOL)

Bagian dari mandat UNMISSET ialah memberikan penegakan hukum sementara dan keamanan umum, yang telah dilihat sejumlah keberhasilan dan kegagalan yang kasat mata, khususnya insiden Dili pada 4 Desember 2002. UNPOL, yang memikul tanggungjawab komando atas polisi Timor Lorosa’e (TLPS), mengalami kekurangan di bidang transparansi, koordinasi dan tanggungjawab. UNPOL juga gagal bertindak secara efektif dalam situasi-situasi kritis, dan tidak memberikan arahan jelas kepada TLPS.

UNMISSET juga masih mengemban tanggungjawab membantu perkembangan Pelayanan Kepolisian Timor Lorosa’e. Walaupun UNPOL tengah melatih banyak prajurit TLPS, pelatihan tersebut masih belum cukup baik dari segi waktu maupun kandungannya, mengingat besarnya jumlah prajurit tak berpengalaman. Lebih lanjut, unit-unit UNPOL yang dilengkapi dengan baik tidak meninggalkan perlengkapan kepada TLPS saat suatu wilayah diserahkan.

Berbagai upaya lebih besar hendaknya ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diakses dan memberikan perhatian yang meningkat terhadap isu hak-hak manusia. Saat UNPOL menyerahkan suatu wilayah kepada tanggungjawab TLPS, kendaraan, senjata, peralatan komunikasi dan lainnya yang telah digunakan seyogyanya ditinggalkan di wilayah tersebut. PBB bisa bekerja sama dengan badan-badan donor untuk mendapatkan peralatan-peralatan tambahan bagi TLPS.

Untuk sisa misi UNMISSET selanjutnya, pengambilan keputusan di bidang operasi sebanyak mungkin semestinya dialihkan kepada pejabat polisi Timor Lorosa’e. Setelah UNMISSET berakhir, polisi internasional yang masih tinggal seharusnya bertindak sebagai penasehat, untuk memberikan pelajaran tambahan di ruang kelas dan di lapangan pelatihan, tetapi mereka tidak harus memikul tanggungjawab operasional atau komando.

Keadilan: Menyelidiki, mempersidangkan dan mengadili para pelaku kekerasan berat yang dilakukan di dan terhadap Timor Lorosa’e antara 1975 dan 1999

Sebagian besar dari kekerasan tersebut merupakan “kekerasan terhadap kemanusiaan”, sehingga semua warga manusia bertanggungjawab untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kekerasan-kekerasan tersebut tidak melarikan diri dengan impunitas. Kebanyakan pelaku kejahatan tengah diberi tempat aman oleh pemerintah Indonesia, yang telah memperlihatkan dirinya tidak becus memberikan keadilan dalam sistem peradilannya, dan yang berkeberatan bekerja sama dengan UNTAET, UNMISSET dan proses-proses internasional lainnya. Banyak dari mereka dewasa ini tengah mengulang kekerasan yang sama sebagaimana pernah mereka arahkan di sini terhadap rakyat Aceh dan rakyat di tempat-tempat lainnya.

Jika masyarakat internasional tidak bersedia memaksa Indonesia bekerja sama dengan keadilan, tidak ada alasan untuk melanjutkan teka teki munafiknya. Saran-saran berikut secara optimis mengandaikan bahwa akan ada kemauan politik masyarakat internasional akan keadilan selama seper-empat abad kekerasan terhadap rakyat Timor Lorosa’e dan kemanusiaan.

Kami harus tetap yakin bahwa suatu pengadilan internasional untuk Timor Lorosa'e merupakan opsi terbaik. Akan tetapi, kami menawarkan sejumlah pengamatan akan proses keadilan yang tengah dijalankan, dan mengenai sejumlah problematikanya.

Kendatipun Unit Kejahatan Berat lamban dimulai, unit ini telah mendakwa lebih dari 300 orang, termasuk sejumlah jenderal Indonesia yang mendalangi kekerasan di sini selama 1999. Sayangnya, lebih dari 70% dari para terdakwa tengah menikmati kekebalan hukum di Indonesia, suatu negara yang tidak menghormati komitmennya bekerja sama di bidang penyelidikan dan ekstradisi. Hanya sedikit perintah penangkapan yang telah terdaftar pada Interpol, dan belum ada seorang pun tersangka pelaku kejahatan yang ditangkap di luar Timor Lorosa'e. Sebagian besar penyelidikan belum rampung. Selanjutnya, Unit Kejahatan Berat membatasi penyelidikannya pada tahun akhir pendudukan ilegal Indonesia (1999), walaupun lebih dari 98% dari rakyat yang terbunuh selama pendudukan meninggal sebelum 1999 dan mandat legal SCU meliputi kekerasan-kekerasan serupa tanpa suatu batas waktu.

Proses yang sangat lamban tersebut telah menimbulkan frustrasi di kalangan korban dan masyarakat Timor Lorosa'e lainnya.

Jika masyarakat internasional serius akan keadilan, dan dapat memaksa Indonesia bekerja sama, PBB barangkali dapat memenuhi tanggungjawabnya akan keadilan dan masyarakat Timor Lorosa'e. Penyelidikan-penyelidikan yang dimulai menjelang Mei 2004 harus diselesaikan, tak peduli berapa lama penyelidikan itu bakal berlangsung. Semua tersangka yang telah atau akan didakwa harus ditangkap dan diadili.

Suatu bagian esensial dari keadilan ialah melakukan persidangan, naik banding dan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang telah dituduh dan didakwa. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat didirikan oleh UNTAET untuk melakukan fungsi ini, dan panel tersebut telah diteruskan di bawah dukungan bersama UNMISSET dan pemerintah Timor Lorosa'e. Tetapi, panel itu telah menjadi lamban dan tidak efektif, dan mengalami kekurangan di bidang dukungan lembagawi dan sumber daya. Hanya sekitar 11% dari terdakwa telah diadili, dan sangat sedikit upaya naik banding yang telah diajukan. Ini jelas-jelas merupakan suatu tugas yang belum selesai, dan merupakan satu dari tugas yang tidak harus berakhir sebelum dan sesudah misi UNMISSET.

Suatu bagian esensial dari keadilan ialah melakukan persidangan, naik banding dan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang telah dituduh dan didakwa. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat didirikan oleh UNTAET untuk melakukan fungsi ini, dan panel tersebut telah diteruskan di bawah dukungan bersama UNMISSET dan pemerintah Timor Lorosa'e. Tetapi, panel itu telah menjadi lamban dan tidak efektif, dan mengalami kekurangan di bidang dukungan lembagawi dan sumber daya. Hanya sekitar 11% dari terdakwa telah diadili, dan sangat sedikit upaya naik banding yang telah diajukan. Ini jelas-jelas merupakan suatu tugas yang belum selesai, dan merupakan satu dari tugas yang tidak harus berakhir sebelum dan sesudah misi UNMISSET.

Jika masyarakat internasional ingin mencapai keadilan, keinginan tersebut hanya dapat direalisasikan dengan tekad yang meningkat, sumber daya dan keinginan politik masyarakat internasional. Hingga Dewan Keamanan mendirikan suatu pengadilan internasional sebenarnya, Panel Khusus anakan internasional-nasional seharusnya tetap dipertahankan guna menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh PBB, hingga semua orang yang telah didakwa SCU dibawa ke pengadilan. Pengadilan Banding harus juga dilanjutkan dengan kehadiran hakim-hakim internasional dan dukungan sehingga para terdakwa dapat menikmati hak-hak legal penuh mereka.

Di sisi lain, jika masyarakat internasional tidak menginginkan keadilan di sini, dan jika Unit Kejahatan Berat hanya merupakan suatu latihan hubungan masyarakat belaka untuk mengeluarkan dakwaan dengan tiadanya kemungkinan serius akan penangkapan dan pengadilan, sandiwara tersebut jangan pernah dilanjutkan.

Kelompok Dukungan Sipil (Penasehat Teknis)

Sayangnya, sejarah traumatis Timor Lorosa'e dan kurangnya para pejabat pemerintah dan administrator berpengalaman terus-menerus membutuhkan para penasehat internasional di sejumlah bidang kunci pemerintahan. Para penasehat ini seharusnya "membantu, bukannya melakukan" – fungsi utama para penasehat hendaknya membangun kecakapan orang Timor Lorosa'e, sehingga hanya sedikit penasehat internasional yang dibutuhkan di masa datang, sehingga tidak memaksakan konsep-konsep atau pola yang tidak cocok dari negara-negara lain. Untuk sisa Misi ini, orang Timor Lorosa'e harus memiliki kendali lebih besar lagi atas siapa yang menjadi penasehat dan tugas yang dibebankan kepada mereka. Jika Kelompok Dukungan Sipil dapat meningkatkan kinerjanya dan keterampilan-keterampilan bahasa, mereka dapat tetap mengabdikan rakyat Timor Lorosa'e setelah mandat UNMISSET berakhir.

Hak-hak Manusia

Unit Hak-hak Manusia dari UNTAET dan UNMISSET telah memberikan pelayanan berharga, tetapi masih sangat perlu ditingkatkan. Materi-materi tambahan perlu dikembangkan dalam bahasa-bahasa setempat. HRU hendaknya bekerja sama secara lebih erat dengan masyarakat sipil, terutama yang berada di luar Dili, dengan mendirikan pusat informasi mengenai hak-hak manusia berisikan dokumen yang dapat diakses semua orang di setiap distrik, serta mengembangkan suatu kelompok pelatih dan pendidik Timor Lorosa'e di bidang hak-hak manusia di seluruh negeri.

Setelah berakhirnya mandat UNMISET, kehadiran suatu Unit Hak-Hak Manusia PBB di Timor Lorosa'e seyogianya diteruskan, untuk mengerjakan segala tugas sebagaimana tertulis di atas dan membantu masyarakat sipil, Parlemen dan Pemerintah dengan pelatihan dan informasi seputar tolok-ukur hak-hak manusia, prosedur-prosedur dan konvensi internasional.

Kesimpulan

Setelah empat tahun kehadiran PBB secara besar-besaran di Timor Lorosa'e, sejumlah pelajaran yang dipelajari telah diterapkan di sini, sementara yang lainnya akan ditingkatkan dengan misi-misi mendatang di tempat-tempat lainnya.

Tetapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa belum menyelesaikan tugas yang semestinya dikerjakan saat badan ini tiba. Timor Lorosa'e kini merupakan sebuah negara merdeka secara politis, tetapi ketergantungan yang disebabkan oleh ketidakefektifan internasional di masa lalu dan kini masih tetap kuat. Jika masyarakat internasional bermaksud memenuhi janji-janjinya, suatu kehadiran internasional akan diperlukan di Timor Lorosa'e setelah Juni 2004. Tetapi, tanpa perubahan-perubahan signifikan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran tersebut hanya merupakan upaya pemborosan waktu dan uang.

Banyak kalangan di dalam masyarakat PBB berpikir akan Timor Lorosa'e sebagai satu dari cerita sukses paling besar dari organisasi tersebut. Tetapi jika sukses tersebut tidak lebih dari suatu mitologi, banyak penyesuaian dan kerja keras masih harus dilakukan.

Terima kasih atas dukungan tuan-tuan kepada Timor Lorosa'e sejak 1999, dan atas perhatian tuan-tuan akan saran-saran kami. Selama lebih dari tiga tahun lembaga kami telah melaporkan banyak dari isu-isu ini, dan laporan-laporan tersebut tersedia pada situs web kami www.etan.org/lh. Sebagaimana kami masih terus melakukan pantauan dan laporan kami, laporan-laporan mendatang masih akan dapat diakses pada situs tersebut.

Kami senang akan peluang guna mendiskusikan atau menyediakan informasi tambahan mengenai salah satu dari pokok-pokok ini.

Hormat saya,



Inês Martins, Koordinator Umum

Editorial: Operasi Darurat Militer di Aceh *(dilanjutkan di halaman berikut)*

(hegemoni TNI/POLRI) dan mengabsahkan tindakan-tindakan yang ekstra yudicial dan melanggar Hak Asasi Manusia yang sangat kejam dan dahsyat.

Andaikata pemerintah mau merefleksikan diri atas tindakan militer di Timor-Lorosa'e dan mempunyai kemauan politik untuk mengimplementasikan Tap MPR RI No. IV/1999 tentang GBHN butir G yang mengatur tentang pembangunan daerah "*Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer*", pemerintah RI seharusnya menyelesaikan persoalan Aceh secara damai tanpa harus menggunakan kekuatan militer.

Operasi militer terbaru dimulai 21 Mei 2003. Data sementara yang dirangkum oleh Markas Besar POLRI, mencatat bahwa hingga hari ke-45 pelaksanaan Operasi

Militer, sebanyak 115 sipil dilaporkan tewas, 80 luka-luka, dan 69 hilang. Sedangkan di pihak GAM tercatat 112 orang tewas, 4 luka-luka, 10 hilang dan 113 ditangkap, serta 146 lainnya menyerahkan diri. Selanjutnya, korban jiwa dari POLRI tercatat 9 tewas dan 44 luka-luka. Masih berdasarkan data Mabes POLRI, tercatat 518 sekolah, 224 rumah penduduk, 11 kantor, 3 fasilitas umum, 2 obyek vital, 5 jembatan, 2 sepeda motor dan 62 mobil di bakar. Pada saat jatuhnya banyak korban, operasi militer di Aceh pasca DOM terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan nama sandi yang terkesan seolah-olah menyentuh seperti "Operasi Sadar Rencong" dan "Operasi Cinta Meunasah". Juga alasan-alasan penambahan pasukan TNI di Aceh yang "dibungkus dengan rapi" sehingga kelihatan seperti melakukan bakti sosial masyarakat. Padahal hampir semua orang tahu bahwa itu hanyalah cover story (cerita sampul) dari operasi militer yang sedang dan akan terus berlaku di Aceh.

Operasi-operasi tersebut sangatlah mirip dengan operasi-operasi militer yang diterapkan di Timor Lorosa'e seperti operasi Seroja, operasi komodo dan operasi-operasi yang lainnya yang mana telah banyak menimbulkan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Hampir setiap hari masyarakat dihadapkan pada berita penganiyaan, penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh TNI/POLRI tanpa sebab yang jelas. Para pimpinan militer Indonesia yang sekarang memimpin operasi militer di Aceh, dulunya merupakan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1999 di Timor Lorosa'e. Kiki Syahnakri, Tono Suratman, Timbul Silaen dan beberapa komandan militer yang lain adalah otak-otak pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Mereka semua lolos dari pengadilan Ad-Hoc Jakarta Seperti kita semua prediksikan bahwa pengadilan tersebut tidak akan mampu membawa keadilan bagi para korban di Timor-Leste.

Kini, "perang" di Aceh resmi deklarasikan melalui Kepres No 28 tahun 2003 oleh pemerintah, Panglima TNI mengusulkan penambahan anggaran sebanyak Rp 1,7 triliun untuk enam bulan operasi militer di Aceh kepada DPR RI (Kompas, 13/5) . hal tersebut patut kita kritisi bersama, apalagi dalam kondisi negara sedang krisis. Untuk 30.000-an prajurit di Aceh, anggaran itu tentu amat besar. Namun untuk penyediaan peralatan perang di Aceh, mulai dari amunisi, senapan mesin, tank ampibi dan squadron pesawat tempur mungkin tidak mencukupi, apalagi tingkat kebocoran anggaran militer yang tinggi.

Perlawanan rakyat Aceh muncul sebagai reaksi terhadap eksploitasi ekonomi oleh pemerintah pusat yang sentralistik dengan menggunakan militer sebagai instrumennya. Kebijakan-kebijakan dan tindakan politik dan ekonomi pemerintah pusat yang dianggap tidak menguntungkan rakyat Aceh, maka pemerintah pusat menggunakan militer untuk mengamankan berbagai kebijakan dan tindakannya itu dengan melakukan tekanan terhadap masyarakat lokal. Namun ternyata tekanan –tekanan itu sekaligus merupakan faktor pencipta kesadaran rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan.

Menurut cerita seorang sumber untuk menunjukkan begitu kuatnya kepentingan "perolehan materi" bagi tentara dibalik tindakan-tindakan represif mereka menyatakan, " waktu berangkat ke Aceh tentara membawa "M-16", namun setelah pulang mereka membawa "16-m" (enam belas milyar). Mereka bisa melakukan berbagai cara untuk memperoleh itu termasuk didalamnya melakukan berbagai upaya untuk menakuti sebagian pengusaha dan birokrat (dengan dalih, misalnya dituduh membantu GAM) sehingga untuk menyelamatkannya memerlukan jaminan. Banyak pengusaha merasa bahwa lebih baik memberikan uang kepada tantara daripada kehilangan nyawa.

Setidaknya ada tiga kepentingan militer yang menonjol di Aceh, yaitu kepentingan karir, bisnis, dan belakangan juga kepentingan untuk mempertahankan eksistensi diri. Aceh selama ini khususnya pada masa DOM menjadi semacam tempat yang dijadikan "proyek pelatihan militer ", di mana banyak nya jumlah masyarakat Aceh yang berhasil dibunuh dijadikan standar bagi kelulusan mereka dalam latihan itu. Pernyataan ini didasarkan pada temuan dilapangan bahwa

ada semacam korelasi antara kenaikan pangkat dengan tempat penugasan mereka di Aceh. Mereka yang bertugas di KOREM 011 Lilawangsa biasanya akan memperoleh jenjang kenaikan pangkat yang mulus, sebelum akhirnya nanti memasuki posisi penting dalam struktur pemerintahan sipil.

Menurut catatan Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (Samak), Pemerintah Propinsi NAD tak pernah mempertanggungjawabkan berbagai dana bantuan baik kepada masyarakat maupun DPRD setempat. Diantaranya adalah dana kemanusiaan dari bantuan luar negeri, Pertamina dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang jumlah totalnya ditaksir mencapai Rp 1,18 triliun.

Kesimpulan:

Apa yang terjadi di Aceh sekarang ini adalah merupakan refleksi bagi kita semua, agar kita bisa mencari upaya-upaya guna menghentikan sepak terjang TNI/POLRI yang sangat sadis dan beringas. Kita semua telah mengetahui para pimpinan penanggungjawab operasi militer di Aceh adalah para petinggi militer Indonesia yang sebelumnya pada tahun 1999 melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan di bumi lorosa'e. Dunia mengetahui hal itu, akan tetapi dunia seolah-olah buta dan bisu, pembantaian yang dilakukan oleh TNI dan POLRI bukan saja dilakukan di Timor Lorosa'e dan Aceh, tetapi pembantaian, penculikan, pemerkosaan itu terjadi di berbagai tempat di Indonesia termasuk di Maluku dan di Papua Barat.

Tindakan komunitas internasional adalah sangat penting untuk menghentikan represi TNI/POLRI terhadap rakyat Aceh, termasuk sebuah Pengadilan Kejahatan Internasional bagi kejahatan yang mereka lakukan di Timor Lorosa'e. Adalah penting bagi Amerika Serikat, Inggris dan penyuplai senjata dan pelatihan untuk militer Indonesia lainnya, untuk menghentikan dukungannya terhadap pelanggaran hak asasi secara besar-besaran seperti dilakukan militer Indonesia.

Negara Timor Lorosa'e yang yang telah merdeka kini dalam posisi yang sulit. Pada satu sisi, negara baru yang kecil ini sulit untuk melakukan intervensi ke Indonesia, apalagi secara ekonomi negara yang masih sangat lemah ini secara ekonomi tergantung pada hubungan dagang dengan bekas penjajahnya. Namun di sisi lain, Timor Lorosa'e sekarang hidup dalam suasana demokrasi dengan menjamin kebebasan menyatakan pendapat secara damai bagi semua orang, juga karena kewajiban sebuah konstitusi (Artikel 10) yang mengatakan bahwa "mengembangkan solidaritas kepada perjuangan semua masyarakat yang berjuang untuk pembebasan sebuah bangsa". Timor Lorosa'e berjuang keras untuk kemerdekaannya, para aktivis (akhirnya juga pemerintah) di seluruh dunia mengutuk Indonesia yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemerdekaan dan demokrasi di Timor Lorosa'e datang bagaikan sebuah nilai yang luhur, dan oleh karenanya tidak semestinya dikorbankan dan dipaksakan untuk menentang tumbuhnya gerakan demokratisasi di Indonesia dimana pada saat yang sama Indonesia meningkatkan represinya terhadap masyarakat Aceh. ❖

Editorial: Operasi Darurat Militer di Aceh

Pada tanggal 21 Mei 2003, Militer Indonesia melancarkan operasi militer besar-besaran di Aceh, dengan konsekuensi bahwa tidak hanya menghancurkan pihak pejuang kemerdekaan, tapi juga masyarakat biasa. Kegagalan dalam pembicaraan damai dimana pemerintah Indonesia telah mengabaikan isu-isu hak asasi manusia, telah menimbulkan ketakutan akan terus berlanjutnya operasi tersebut dalam waktu yang lama. Perusahaan minyak multinasional, khususnya Exxon Mobil dari Amerika Serikat bersikap menyetujui ketika operasi tersebut dirasa melindungi kepentingan ekonomi mereka. Apalagi para pemimpin militer Indonesia yang ada tidak pernah mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan yang dilakukannya terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e, dan TNI pun terus menerima pelatihan dan persenjataan dari beberapa negara. Sesuatu yang sangat mengherankan jika mereka berharap dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mendapatkan kekebalan yang kedua kalinya.

Pada tahun 1873 orang Aceh mulai melancarkan perang selama 40 tahun terhadap kolonialis Belanda dan Aceh tidak pernah ditaklukkan. Meskipun korban berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun Belanda, korban 60.000 jiwa itu terlalu sedikit untuk perang terganas yang dihadapi Belanda di daerah jajahannya.

Selama lima puluh tahun yang lalu, Aceh telah menjadi daerah istimewa bagi Pemerintah Indonesia, namun hal-hal pokok yang merupakan pengulangan operasi-operasi militer:

- ☠ 1953-1961 (DI/TII);
- ☠ 1977-1982 (Operasi sadar and Siwah)
- ☠ 1989-1998 Operasi Jaring Merah dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh
- ☠ 1999 (Operasi Wibawa)
- ☠ 1999-2000 (OSR I/II)
- ☠ 2000-2001 (OCM I/II)
- ☠ 2001-hingga sekarang Operasi Pemulihan Keamanan (Opslihkam)

Di Aceh tangisan pilu karena anak-anak kehilangan orang tuanya, isteri kehilangan suaminya atau sebaliknya, bau busuk mayat dan asap mesiu membuat aroma perang di Aceh semakin menyengat dan menyedihkan. Tindakan dan perilaku konflik di Aceh mengingatkan kita pada pendudukan 7 Desember 1975 di Timor Lorosa'e. Dilihat dari pemberitaan media elektronik dan cetak, nampaknya pendudukan 7 Desember 1975 terulang kembali di negeri Aceh.

Hal ini terjadi setelah perundingan Dewan bersama antara pemerintah RI dan GAM yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre mengalami jalan buntu. Sebagai reaksi atas mandeknya perundingan itu, pemerintah RI langsung memperkuat barisan pertahanannya melalui kampanye Operasi

Militer Terpadu dengan meningkatkan kekuatan TNI dan POLRI. Satuan kekuatan TNI dan POLRI yang didukung dengan peralatan militer yang canggih seperti senapan mesin, tank amfibi, kapal perang hingga squadron pesawat tempur dikerahkan ke Aceh dengan misi penegakkan kedaulatan NKRI. Namun dilihat dari tindakan dan perilaku TNI dan POLRI yang menggerakkan semua kekuatan militernya di Aceh memperjelas situasi perang yang mengerikan seperti yang dilakukan di Timor Lorosa'e selama 24 tahun.

Selama berlakunya operasi militer tersebut telah menimbulkan kecurigaan bahwa itu hanya siasat saja untuk menciptakan rasa ketakutan rakyat Aceh yang mendalam, dan disisi lain semakin menjadikan TNI/POLRI leluasa bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan mereka baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Kecemasan dan ketakutan rakyat dijadikan kesempatan untuk semakin mengkokohkan posisi

(Lanjutan dari hal 27)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosa'e yang memantau, menganalisis, dan melapor tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosae maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan Anda menghubungi kami jika anda mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapat perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.